

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Informan Banjarmasin Timur**

###### **a. Masyarakat I**

**Nama: HU**

**Usia: 30 Tahun**

**Jenis Kelamin: Laki-laki**

**Pekerjaan: Bidang Jasa**

Wawancara dengan HU menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat Banjar, meskipun anak dipahami sebagai karunia Allah, tetap ada harapan kuat agar pasangan yang menikah segera memiliki keturunan. Ia menyatakan bahwa, “*anak itu kan karunia Allah, terserah sidin pabila hendak membari, tapi harapannya dari diri kita segera memiliki anak.*” Harapan ini bukan hanya bersifat religius, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan usia, tenaga, dan peran orang tua dalam pendidikan anak. Ia menjelaskan bahwa jika memiliki anak terlalu terlambat, orang tua akan kesulitan secara fisik dan emosional, bahkan bisa kehilangan kesempatan untuk mendampingi anak sampai dewasa, “*pas sudah tuha hanyar beisi anak, tenaga sudah uyu... misalnya kita meninggal, kada sempat melihat perkembangan pendidikan.*”

Meski demikian, HU tetap membedakan kondisi pasangan. Ia mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, seperti beban utang atau kondisi ekonomi berat, penundaan dapat dimaklumi. Menurutnya, “*kalo misal banyak bisi hutang, baiknya lunasi dulu, hanyar program bisi anak.*” Namun, jika pasangan tidak memiliki beban berat tetapi tetap menunda, hal itu dipandang tidak wajar.

Dalam membedakan antara menunda dan menolak anak, HU memberikan batas yang tegas. Ia menyatakan bahwa menunda demi pendidikan anak masih dapat dibenarkan, tetapi menunda karena takut tidak mampu memberi makan dianggap sebagai bentuk meragukan rezeki Allah. Ia mengatakan, “*kalo takut kada bisa membari makani, ulun kada membenarkan... tapi kalo takut kada bisa menyekolahkan, masih bisa dibenarkan.*” Sementara itu, pasangan yang secara terbuka tidak ingin memiliki anak dipandang sangat menyimpang dari tujuan pernikahan. HU menegaskan, “*kalo ada yg terang-terangan kada mau bisi anak, harus dipertanyakan tujuannya nikah apa... tujuan nikah kan menjunjung sunnah Nabi dan memperbanyak umat Rasulullah.*”

Stigma sosial juga tampak dalam pandangan masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi. HU menyebutkan bahwa dalam lingkungan sosialnya berkembang kepercayaan bahwa menggunakan KB di awal pernikahan dapat menyebabkan sulit punya anak di kemudian hari. Ia menyatakan, “*kalo bisa di awal nikah tu jangan KB dulu... sudah ada yang kejadian seperti itu.*” Keyakinan ini

memperkuat tekanan agar pasangan segera memiliki anak setelah menikah.

Dalam hal pemberian nasihat, HU menilai bahwa pasangan yang menunda harus dilihat dulu alasannya. Jika alasan dianggap tidak sah secara religius, seperti takut rezeki, maka mereka perlu dinasihati. Sebaliknya, jika alasannya demi pendidikan anak, penundaan masih bisa diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan standar moral dan religius tertentu untuk menilai sah atau tidaknya penundaan kehamilan. HU juga mengkritik kecenderungan pasangan modern yang menunda kehamilan demi gaya hidup dan kesenangan. Ia menyebut bahwa, *“jaman sekarang wajar menunda kehamilan karena kebanyakan suami istri masih hendak beramian... padahal kalo sudah nikah hal-hal seperti itu dikurangi.”* Ini menunjukkan bahwa stigma terhadap penundaan tidak hanya berbasis biologis dan ekonomi, tetapi juga pada penilaian moral tentang keseriusan dalam menjalani pernikahan.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa HU tidak setuju dengan sikap menunda miliki anak, apalagi tidak ingin punya anak. stigma masyarakat Banjar terhadap pasangan yang menunda memiliki anak berakar pada keyakinan religius, nilai keluarga, dan norma sosial tentang tujuan pernikahan. Penundaan masih dapat ditoleransi jika memiliki alasan yang dianggap sah, tetapi penolakan

terhadap anak atau penundaan tanpa dasar yang kuat dipandang sebagai penyimpangan dari fungsi dan makna pernikahan.<sup>1</sup>

**b. Masyarakat II**

**Nama: SNR**

**Usia: 25 Tahun**

**Jenis Kelamin: Laki-laki**

**Pekerjaan: Guru Honorer**

Berdasarkan hasil wawancara dengan SNR untuk menjawab rumusan masalah pertama, dapat diketahui bahwa stigma terhadap pasangan yang menunda memiliki anak masih hadir dalam kehidupan sosial, meskipun sering kali muncul dalam bentuk yang halus dan dianggap wajar. SNR menyampaikan bahwa dalam lingkungan masyarakat, pasangan yang belum memiliki anak biasanya akan sering mendapat pertanyaan seperti “*sudah beisi atau belum?*” atau “*kapan menyusul?*”. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi bahwa setelah menikah, pasangan seharusnya segera memiliki anak. Walaupun disampaikan sebagai basabasi, pertanyaan tersebut mencerminkan adanya norma sosial yang menempatkan memiliki anak sebagai hal yang dianggap normal dan ideal dalam perkawinan.

---

<sup>1</sup> HU, Bidang Jasa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 29 Desember 2025

Selain dalam bentuk pertanyaan, stigma juga muncul melalui nasihat-nasihat yang diberikan kepada pasangan yang menunda kehamilan. SNR menyebutkan bahwa masyarakat sering mengatakan bahwa “*anak adalah pintu rezeki*”. Ungkapan ini memperlihatkan bahwa masyarakat memandang kehadiran anak bukan hanya sebagai anugerah, tetapi juga sebagai sesuatu yang seharusnya diharapkan dan diusahakan oleh setiap pasangan. Secara tidak langsung, pasangan yang belum atau menunda memiliki anak dapat dipersepsikan sebagai belum menjalani peran rumah tangga secara “sempurna”.

Meskipun SNR menyatakan bahwa perasaannya pribadi terhadap pasangan yang menunda anak adalah biasa saja dan menghormati pilihan mereka, pola pertanyaan dan nasihat yang terus berulang dari lingkungan sosial tetap menunjukkan adanya tekanan normatif. Dengan kata lain, stigma tidak selalu muncul dalam bentuk kecaman atau penolakan terbuka, tetapi hadir melalui bahasa sehari-hari, ungkapan budaya, dan harapan sosial yang terus diarahkan kepada pasangan.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap pasangan yang menunda memiliki anak lebih banyak berbentuk tekanan sosial yang halus dan kultural. Norma bahwa pasangan menikah “seharusnya” segera memiliki anak masih sangat kuat, sehingga pasangan yang belum atau menunda kehamilan tetap

berada dalam posisi yang diawasi dan dinilai oleh lingkungan sosialnya.<sup>2</sup>

**c. Pasangan I**

**Nama: H**

**Usia: 22 Tahun**

**Jenis Kelamin: Perempuan**

**Pekerjaan: Mahasiswi**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan. Dalam wawancara, H bercerita bahwa dirinya pernah mendapat pertanyaan seputar anak setelah menikah. Pertanyaan-pertanyaan itu biasanya muncul dalam bentuk perbandingan dengan orang lain, misalnya, “*Kapan punya anak? Si itu 3 bulan kawin sudah isi*”.

Menanggapi hal semacam itu, H berusaha bersikap tenang. Ia memilih untuk tersenyum dan tidak menanggapinya secara berlebihan. Namun, ia juga jujur mengakui bahwa jika terlalu sering ditanya hal yang sama, rasa kesal pun muncul. “*Menanggapi dengan baik, hanya tersenyum. Tapi kalo keseringan kesel juga*,”.

---

<sup>2</sup> SNR, Guru Honorer, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 29 Desember 2025

Menurut H, pertanyaan seperti itu lebih sering datang dari masyarakat sekitar, bukan dari keluarga atau kerabat dekat. Keluarganya sendiri cenderung biasa saja dan tidak menekan dirinya untuk segera memiliki anak. Justru, masyarakat sekitar yang sering mempertanyakan hal tersebut, seolah-olah ada standar waktu yang harus dipenuhi. Namun bagi H, situasi ini tidak memberi dampak besar pada kehidupannya, baik secara positif maupun negatif.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut. H mengatakan bahwa keputusan ini merupakan kesepakatan bersama dengan pasangan. “*Alasan pendidikan, karena masih kuliah dan masih terlalu muda,*” katanya. H menegaskan bahwa pilihan tersebut murni keputusan berdua, bukan karena intervensi keluarga besar. “*Keputusan tidak terkait keluarga besar, kesepakatan berdua,*” tambahnya.

Selain alasan pendidikan, H juga menyimpan kekhawatiran pribadi. Ia khawatir jika harus memiliki anak di usia yang masih sangat muda, terutama karena ia masih berkuliahan. “*Takut kuliah terganggu dan sempat ada rasa takut memiliki anak,*” ucapnya. Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan

pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tanggah tangga.<sup>3</sup>

**Nama: LI**

**Usia: 22 Tahun**

**Jenis Kelamin: Laki-Laki**

**Pekerjaan: Mahasiswa**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan. LI menceritakan bahwa dirinya hampir selalu mendapat pertanyaan seputar anak setelah menikah. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, “*Kapan punya anak?*”.

Berbeda dengan sebagian orang yang memilih menjawab secara halus, LI justru punya cara khas dalam merespons. Ia mengaku kerap memberikan *bombastic side eyes* sebagai bentuk tanggapan. Menurutnya, respons ini cukup membuat si penanya paham sehingga tidak melanjutkan pertanyaan. “*Tanggapan ini cukup membuat si penanya paham sehingga tidak bertanya lebih lanjut*,” jelasnya.

---

<sup>3</sup> H, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 15 Agustus 2025.

Dari segi lingkungan, keluarga dan kerabat memang pernah menyarankan agar cepat memiliki anak. Namun, mereka tidak bersikap memaksa. Hal ini berbeda dengan masyarakat sekitar yang sering melontarkan pertanyaan sebagai bentuk basa-basi. “*Keluarga dan kerabat ada menyuruh cepat beanak, tapi kada memaksa. Masyarakat saja yang suka basa basi,*” ungkapnya.

Meski sering mendapat pertanyaan, LI mengaku tidak merasa terganggu. Ia bahkan punya cara balik untuk menghadapi situasi tersebut. “*Tidak sama sekali. Karena si penanya juga belum nikah, jadi saya balas, ‘Kapan nikah?’*” katanya sambil tertawa. Secara keseluruhan, LI menyimpulkan bahwa komentar atau pertanyaan dari luar tidak berdampak apa-apa pada dirinya.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut. LI menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang melatarbelakangi keputusannya. Ia menyebutkan, “*Alasan kuliah, kurang suka anak-anak, takut tidak bisa menjadi ayah yang baik (karena basic diri suka mukul sehingga takut KDRT), belum bekerja, ekonomi belum stabil, Gibran jadi wapres dan Indonesia gelap.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pertimbangan LI tidak hanya

bersifat personal, tetapi juga terkait kondisi sosial dan politik yang ia rasakan.

Keputusan untuk menunda anak merupakan hasil kesepakatan bersama pasangan. Bahkan, keluarga besar ikut terlibat dalam pertimbangan ini, khususnya karena mereka khawatir pendidikan bisa terganggu jika dalam kondisi mengandung. LI menambahkan bahwa ia dan pasangannya sudah membuat perjanjian pranikah untuk tetap melanjutkan pendidikan meskipun telah menikah. *“Dalam perjanjian pranikah kami membuat kesepakatan meskipun sudah menikah kami harus tetap lanjut kuliah,”*.

Selain itu, ia juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi ekonomi dan kestabilan emosional. *“Ekonomi tidak stabil, Indonesia gelap, dan menurut hukum ekonomi, Indonesia sebentar lagi bubar. Serta khawatir belum bisa menahan kebiasaan suka mukul nantinya ketika punya anak,”* ucapnya.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga tangga.<sup>4</sup>

#### **d. Pasangan II**

---

<sup>4</sup> LI, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 15 Agustus 2025.

**Nama: Z**

**Usia: 26 Tahun**

**Jenis Kelamin: Perempuan**

**Pekerjaan: Ustadzah**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan. Z menyampaikan bahwa dirinya pernah mendapat pertanyaan terkait anak setelah menikah. Dengan singkat ia menjawab, “*Pernah*”. Pertanyaan yang muncul biasanya berupa sindiran ringan, seperti “*Sudah punya anak lah?*” atau “*Sadang ai sudah bisi anak*”.

Namun, Z tidak menanggapinya dengan serius. Ia memilih merespons dengan candaan agar suasana tetap santai. “*Menanggapi dengan candaan, ‘sudah ada 5’, santai*,” ucapnya sambil tertawa kecil.

Meski demikian, ia mengaku tidak terlalu terpengaruh dengan komentar orang-orang. Justru ia merasa heran dengan cara pikir sebagian masyarakat yang terlalu ikut campur. “*Heran aja kaitu nah, kenapa mengurusi diri kita, sedangkan kita sendiri kada bisa membuat sesuatu, apalagi anak. Kenapa lah orang-orang tu pemikirannya pendek banar*,” ungkapnya dengan nada sedikit kesal.

Pada akhirnya, Z menyimpulkan bahwa situasi ini tidak membawa dampak besar bagi dirinya. Ia memilih untuk memaklumi bahwa

sebagian orang mungkin memang tidak memahami kondisinya. “*Netral, tidak positif tidak negatif. Hanya berpikir, berarti orang yang bertanya hanya tidak paham,*”.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut.

Dari sisi keluarga, Z bercerita bahwa ibunya yang sedang sakit stroke justru menyarankan untuk menunda memiliki anak, sehingga tidak ada tekanan dari keluarga inti. Begitu pula dengan kerabat dan masyarakat sekitar, yang menurutnya tidak terlalu ikut campur dalam urusan ini. “*Karena mama sakit stroke, memang menyuruh menunda. Kerabat dan masyarakat sekitar tidak terlalu mengurus,*” jelasnya.

Alasan utama Z belum ingin memiliki anak adalah karena merasa belum siap secara mental, serta kurangnya dukungan akibat kondisi kesehatan ibunya. Ia juga sempat menjalani hubungan jarak jauh dengan suami, yang membuat situasi semakin menantang. “*Belum siap mental, tidak ada pendukung karena mama sakit, sempat jauh dari suami (LDR),*” ujarnya.

Dalam hal keputusan, ia menekankan bahwa pilihan untuk menunda anak lahir dari dirinya sendiri, meskipun akhirnya disepakati bersama

pasangan. Kekhawatiran terbesar yang ia rasakan tetap terkait kesiapan mental. “*Belum siap mental*,” katanya menegaskan kembali.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tanggah tangga.<sup>5</sup>

**Nama: AW**

**Usia: 28 Tahun**

**Jenis Kelamin: Laki-laki**

**Pekerjaan: Ustadz**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan. AW mengaku pernah mendapatkan pertanyaan dari lingkungan sekitar mengenai anak. Pertanyaan itu biasanya terdengar sederhana, misalnya, “*Sudah bisa anak kah?*”.

Ia menjelaskan bahwa cara meresponsnya cukup singkat. Biasanya ia hanya menjawab belum, lalu meminta doa agar segera diberikan

---

<sup>5</sup> Z, Ustadzah di RTQ A, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 22 Agustus 2025.

keturunan. “*Hanya menjawab belum, dan minta doakan agar segera,*” katanya.

Meski berusaha memahami, AW tidak menutup diri dari rasa tertekan ketika sering ditanya oleh orang sekitar. Situasi ini sempat ia rasakan sebagai sesuatu yang negatif, karena tekanan sosial membuat dirinya khawatir. Namun, seiring waktu, ia mulai terbiasa menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. “*Negatif karena membuat tertekan. Tapi seiring berjalannya waktu jadi terbiasa menanggapi pertanyaan semacam itu,*” jelasnya.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut.

Dari sisi keluarga, justru ada dorongan agar segera memiliki anak. Menurutnya, keluarga kurang menyarankan untuk menunda. “*Keluarga kurang menyarankan, nyuruh segera punya anak,*” ungkapnya.

Namun, bagi AW, keputusan ini tidak bisa diambil sepihak. Ia menekankan bahwa faktor utama adalah kesiapan sang istri. “*Karena istri belum siap, karena bukan saya sendiri yang menjalani,*” jelasnya. Oleh sebab itu, ia menyerahkan keputusan pada istri, meskipun akhirnya tetap menjadi kesepakatan bersama.

Alasan utama penundaan tetap berkaitan dengan kondisi mental istri yang dirasa belum siap untuk menjalani peran sebagai orang tua. “*Karena mental istri belum siap*,” tegasnya.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga tangga.<sup>6</sup>

## 2. Informan Banjarmasin Selatan

### a. Masyarakat I

**Nama: APT**

**Usia: 23 Tahun**

**Jenis Kelamin: Perempuan**

**Pekerjaan: Guru**

Berdasarkan hasil wawancara dengan APT untuk menjawab rumusan masalah pertama, terlihat bahwa sikap terhadap pasangan yang menunda memiliki anak berada dalam posisi antara penerimaan dan tekanan norma sosial. Secara prinsip, APT menyatakan bahwa keputusan menunda memiliki anak bergantung pada kesiapan masing-masing pasangan, baik dari segi mental, perencanaan hidup, maupun urusan pribadi yang masih perlu diselesaikan. Hal ini menunjukkan

---

<sup>6</sup> AW, Ustadz di RTQ A, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 22 Agustus 2025.

adanya pemahaman rasional bahwa tidak semua pasangan berada pada kondisi yang sama untuk segera memiliki anak.

Namun demikian, di tingkat sosial, pasangan yang belum memiliki anak tetap berada dalam sorotan lingkungan. APT mengungkapkan bahwa masyarakat sering memberikan respons berupa sindiran halus, doa, atau bahkan pernyataan langsung agar pasangan segera memiliki anak. Walaupun tidak selalu dimaksudkan sebagai tekanan, pola respons semacam ini memperlihatkan bahwa ada norma kuat dalam masyarakat yang menganggap memiliki anak sebagai tahapan yang “seharusnya” terjadi setelah menikah. Dengan kata lain, pasangan yang belum memiliki anak, baik karena menunda atau alasan lain, tetap diposisikan sebagai pihak yang belum memenuhi ekspektasi sosial.

Menariknya, APT juga membedakan antara menunda dan tidak ingin memiliki anak sama sekali. Menurutnya, menunda masih dianggap wajar dan dapat diterima, tetapi jika pasangan memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali, hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan karena dianggap bertentangan dengan nilai tanggung jawab terhadap keberlanjutan generasi. Pandangan ini menunjukkan bahwa stigma tidak hanya berkaitan dengan waktu memiliki anak, tetapi juga dengan makna moral yang dilekatkan pada keputusan memiliki atau tidak memiliki keturunan.

Selain itu, meskipun APT menilai bahwa pemberian nasihat kepada pasangan yang menunda tidak terlalu diperlukan, ia tetap

menganggapnya wajar sebagai bentuk “pengingat” agar pasangan tidak sampai mengubah keputusan menjadi tidak ingin punya anak sama sekali. Hal ini kembali menunjukkan bagaimana masyarakat memosisikan diri sebagai pihak yang merasa memiliki kepentingan moral atas keputusan reproduktif pasangan.

Dengan demikian, hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa stigma masyarakat terhadap pasangan yang menunda memiliki anak tidak selalu muncul dalam bentuk kecaman keras, tetapi hadir melalui harapan normatif, nasihat, sindiran, dan kekhawatiran moral tentang keberlanjutan generasi. Norma bahwa pasangan menikah seharusnya memiliki anak tetap menjadi kerangka berpikir utama yang membentuk cara masyarakat menilai dan merespons pasangan yang memilih untuk menunda.<sup>7</sup>

### **b. Masyarakat II**

**Nama: MRD**

**Usia: 26 Tahun**

**Jenis Kelamin: Laki-laki**

**Pekerjaan: Karyawan Swasta**

Berdasarkan wawancara dengan MRD untuk menjawab rumusan masalah pertama, terlihat bahwa stigma terhadap pasangan yang menunda memiliki anak dibentuk oleh norma sosial yang kuat mengenai

---

<sup>7</sup> APT, Guru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 29 Desember 2025

fungsi perkawinan dan keturunan. MRD menyatakan bahwa pada prinsipnya keputusan memiliki anak merupakan kesepakatan pasangan, namun tetap ada harapan sosial agar pasangan yang menikah memiliki rencana untuk segera mempunyai anak. Sebagaimana disampaikan informan, *“menurut saya, untuk memiliki anak atau tidak harus kesepakatan berdua... tapi kalau tidak ada faktor yang genting atau bahaya, sebaiknya pasangan sudah memiliki rencana untuk mempunyai anak.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan terhadap otonomi pasangan, masyarakat tetap menempatkan memiliki anak sebagai sesuatu yang ideal dan sewajarnya dilakukan setelah menikah. Sikap ini menjadi dasar munculnya stigma terhadap pasangan yang belum memiliki anak.

Lebih jauh, MRD menjelaskan bahwa tekanan sosial sering kali muncul dalam bentuk penilaian dan label negatif dari lingkungan sekitar. Ia menyebutkan secara tegas bahwa, *“mulut-mulut tetangga atau masyarakat terkadang memang menusuk,”* bahkan pasangan yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak kerap dicibir dengan anggapan bahwa mereka mandul atau dianggap memalukan. Menurutnya, *“anggapan orang yang sudah menikah tetapi menunda untuk memiliki anak adalah cibiran yaitu mandul dan... hal yang memalukan.”*

Ungkapan ini menunjukkan bahwa stigma tidak hanya berupa pertanyaan ringan, tetapi juga dapat berkembang menjadi label yang merendahkan martabat pasangan, sehingga memperkuat tekanan sosial bagi mereka yang memilih menunda kehamilan.

Meskipun demikian, MRD membedakan secara jelas antara menunda dan menolak memiliki anak. Menunda dinilai sebagai sesuatu yang masih dapat diterima secara sosial jika disertai alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. MRD menyatakan, *“kalau emang hanya ingin menunda mempunyai anak dengan alasan yang logis bisa dipertimbangkan dan didiskusikan.”* Namun, jika pasangan tidak memiliki alasan yang kuat, maka menurutnya, mereka *“perlu dinasihati secara pelan-pelan.”*

Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif masyarakat, menunda kehamilan masih berada dalam batas kewajaran, tetapi tetap berada di bawah pengawasan norma sosial.

MRD juga menegaskan bahwa alasan-alasan seperti ingin menikmati masa berdua, kondisi ekonomi, dan kesiapan mental dianggap sebagai justifikasi yang sah untuk menunda. Ia menjelaskan bahwa, *“menunda mempunyai anak adalah hal yang wajar dilakukan oleh pasutri... mungkin masih ingin menikmati masa-masa berdua, atau karena faktor ekonomi belum mencukupi, atau belum adanya kesiapan mental.”*

Dengan demikian, stigma masyarakat Banjar terhadap pasangan yang menunda memiliki anak bersifat kondisional. Di satu sisi, masyarakat memberikan ruang toleransi terhadap penundaan yang didasarkan pada kesiapan dan pertimbangan rasional. Namun di sisi lain, norma sosial yang kuat tentang kewajiban memiliki anak membuat pasangan yang belum memiliki anak tetap berada dalam tekanan sosial berupa cibiran, label, dan penghakiman moral. Norma inilah yang kemudian melahirkan stigma bahwa pasangan menikah seharusnya segera memiliki keturunan, sehingga penundaan dipandang sebagai sesuatu yang perlu dijelaskan, dibenarkan, atau bahkan dikoreksi.<sup>8</sup>

### **c. Pasangan I**

**Nama: T**

**Usia: 22 Tahun**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Pekerjaan : Mahasiswa**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan. T mengaku bahwa dirinya sering mendapat pertanyaan seputar anak sejak menikah. Pertanyaan yang muncul pun beragam, mulai dari yang bernada ingin

---

<sup>8</sup> MRD, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 29 Desember 2025

tahu hingga yang menyindir secara halus. Ia menirukan beberapa di antaranya, seperti “*Si itu sudah hamil, ikam kapan? Padahal dulu an kam kawinnya*,”, “*Ayo cepati bisi anak*,”, “*Sudah isi kah?*”, hingga “*Periksa ke dokter pang*”. Bahkan ada juga komentar yang menyinggung pendidikan yang sedang ia tempuh, “*Ngapain kuliah, mending bisi anak aja toh habis lulus cuma di rumah aja*.”

Awalnya, T mengaku tidak terlalu memikirkan komentar semacam itu. Ia menanggapinya dengan santai. Namun, lama-kelamaan, pertanyaan yang terus-menerus datang membuatnya merasa tidak nyaman. “*Awalnya biasa aja, tapi lama kelamaan jadi terganggu*,” ungkapnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang terus datang dari orang sekitar membuatnya merasa tertekan dan sedih. “*Ya, mempengaruhi, karena pertanyaan tersebut selalu ditanyakan. Akhirnya saya merasa terganggu dan sedih kenapa orang-orang tidak bisa menghargai keputusan kami, dan seakan-akan saya tidak bisa memiliki anak selamanya padahal cuma ingin menunda*,” tuturnya dengan nada lirih.

Situasi ini memberi dampak yang cukup negatif bagi dirinya. Ia mengaku mulai merasa lelah secara emosional karena pertanyaan yang sama terus muncul meski sudah hampir dua tahun menikah. “*Berpengaruh negatif karena setelah hampir dua tahun menikah saya terus mendapat pertanyaan yang sama*,” ucapnya.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut.

Dari sisi keluarga, orang tuanya tidak pernah mempermasalahkan keputusan untuk menjalani kehidupan *childfree*. Sejak awal menikah, keluarga sudah memahami bahwa ia dan suaminya memang berencana menunda kehamilan. Berbeda dengan kerabat dan masyarakat sekitar, yang menurutnya lebih sering berkomentar dan mempertanyakan keputusan tersebut. “*Kalau dari orang tua tidak pernah mempermasalahkan karena dari awal menikah sudah tahu ingin menunda, sedangkan kerabat dekat dan masyarakat sekitar lebih sering berkomentar kenapa tidak mau punya anak,*” jelasnya.

Ketika ditanya tentang alasan menunda, T menyebut beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama, yaitu kesiapan mental, emosional, dan finansial. “*Alasannya karena merasa belum siap dari segi mental, emosional, dan finansial,*” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama dengan suami. “*Suami,*” jawabnya singkat ketika ditanya siapa yang terlibat dalam keputusan itu. Namun, keputusan tersebut tidak melibatkan keluarga besar. “*Tidak,*” katanya tegas.

Lebih jauh, T mengaku merasa khawatir belum bisa menjadi orang tua yang baik. Ia merasa belum memiliki cukup pengetahuan untuk mendidik anak. *“Khawatir tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak karena kurangnya ilmu untuk mendidik anak,”* ujarnya dengan jujur.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga<sup>9</sup>

**Nama : A**

**Usia : 22 Tahun**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Pekerjaan : Mahasiswa**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan. A menyampaikan bahwa dirinya pernah mendapat pertanyaan seputar rencana memiliki anak. Pertanyaan yang sering ia dengar umumnya bernada dorongan, seperti *“Kapan istrinya hamil?”* atau *“Ayo secepatnya punya anak.”*

---

<sup>9</sup> T, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 16 Agustus 2025.

Menanggapi hal itu, A memilih bersikap biasa saja. Ia tidak terlalu memikirkan komentar dari orang lain. *“Biasa saja,”* ujarnya singkat.

Meski sering mendapat komentar, A menegaskan bahwa hal itu tidak terlalu memengaruhi dirinya. Ia cenderung tidak ambil pusing terhadap ucapan orang lain. *“Saya merasa tidak terpengaruh karena saya tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain,”* tuturnya.

Namun begitu, ia menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap berdampak negatif, terutama karena bisa mengganggu kenyamanan dirinya dan istrinya. *“Negatif karena mengganggu kenyamanan saya dan istri,”*.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut.

Dari sisi keluarga, orang tuanya bersikap terbuka dan memberikan kebebasan penuh kepada pasangan ini untuk menentukan sendiri waktu yang tepat. *“Sikap orang tua menyerahkan ke kami, tidak mencampuri,”* katanya. Namun, berbeda dengan masyarakat sekitar yang sering mempertanyakan alasan menjalani kehidupan *childfree*. *“Orang di sekitar selalu mempertanyakan kenapa menunda,”* tambahnya.

Mengenai alasan belum memiliki anak, A menjelaskan bahwa ia merasa belum siap menjadi orang tua. Ia menilai dirinya masih kurang memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam mendidik anak. *“Merasa belum siap menjadi orang tua, karena kurangnya ilmu untuk mendidik anak,”* ungkapnya.

Keputusan untuk menunda diambil atas inisiatif dirinya sendiri, tanpa pengaruh keluarga besar.

Ia juga mengakui adanya kekhawatiran pribadi, terutama dalam hal kemampuan mendidik anak dengan baik. *“Khawatir tidak bisa mendidiknya,”* katanya jujur.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga tangga.<sup>10</sup>

#### **d. Pasangan II**

**Nama : AK**

**Usia : 24 Tahun**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Pekerjaan : IRT**

---

<sup>10</sup> A, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 16 Agustus 2025.

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

AK mengaku bahwa setelah menikah, pertanyaan mengenai rencana memiliki anak menjadi hal yang lumrah ia dengar, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Ia menuturkan, “*Iya, setelah menikah sudah menjadi pertanyaan yang sudah biasa ditanyakan oleh masyarakat ataupun keluarga tentang kapan punya anak.*”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, sering kali dengan nada bercanda namun tetap terasa menyinggung. Ia menirukan beberapa di antaranya, seperti “*Pabila jar handak beanak, sadang ai sudah,*” dan “*Apa lagi yang dihadangi, masih belum juu beanak.*”

Meski sering mendengar komentar seperti itu, AK mengaku berusaha menanggapinya dengan santai. Ia biasanya hanya menjawab singkat, “*Inggih, doakan aja,*” sambil tersenyum. “*Saya menanggapinya dengan santai saja,*” ujarnya. Namun, di balik kesan tenang tersebut, tersirat bahwa pertanyaan semacam ini bisa saja menimbulkan rasa tidak nyaman bila diulang terus-menerus.

Menurut AK, sikap orang-orang di sekitarnya beragam. Ada yang bersikap santai dan tidak ikut campur, tetapi ada juga yang terkesan mendesak agar segera memiliki anak. “*Ada berbagai macam sikap dan*

*pandangan, ada yang memandang dengan santai dan tidak ikut campur namun ada juga yang mendesak untuk segera memikirkan kapan untuk mempunyai anak,” jelasnya.*

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan dari sekitar tidak terlalu memengaruhi dirinya. Ia memilih untuk tetap tenang dan tidak terbebani oleh omongan orang. “*Tidak memengaruhi saya sama sekali, karena saya termasuk orang yang santai dengan pertanyaan tersebut,*” katanya.

AK juga menyampaikan pandangannya terhadap budaya bertanya tentang anak kepada pasangan yang baru menikah. Menurutnya, pertanyaan seperti itu kurang etis karena bisa menyinggung perasaan orang lain, terutama mereka yang sedang berjuang untuk memiliki anak. “*Menurut saya stigma tersebut kurang etis saja ditanyakan, apalagi jika ditanyakan kepada pasangan yang pejuang garis dua, maka hal tersebut bisa melukai perasaan orang lain,*” ujarnya.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut

Ketika ditanya mengenai alasan menjalani kehidupan *childfree*, AK menekankan pentingnya kesiapan diri, baik secara fisik maupun mental. Ia berpendapat bahwa memiliki anak bukan hanya soal waktu, tetapi

juga kesiapan untuk mengemban tanggung jawab besar. “*Alasannya mungkin karena merasa belum siap baik fisik maupun mental, karena memiliki anak menurut saya adalah amanah yang sangat besar yang harus dijaga dan dirawat dengan sangat baik,*” tuturnya dengan penuh pertimbangan.

AK menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda anak merupakan hasil diskusi bersama pasangan. Ia dan suami terbiasa membicarakan berbagai hal secara terbuka. “*Kami berdua bersama pasangan selalu berdiskusi dalam berbagai hal, untuk keputusan ini adalah keputusan hasil dari diskusi kami bersama,*” katanya. Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini sepenuhnya berasal dari mereka berdua tanpa campur tangan keluarga besar. “*Tidak, keputusan ini pure dari kami berdua bersama pasangan, tidak ada ikut andil dari keluarga besar,*” tambahnya.

Meski terkesan santai, AK mengakui bahwa ia tetap memiliki kekhawatiran pribadi. Ia takut belum mampu merawat anak dengan baik jika belum siap secara fisik maupun mental. “*Khawatir tidak bisa merawatnya dengan baik karena belum siap fisik maupun mental,*” ucapnya jujur.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan

kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga<sup>11</sup>

**Nama : MAG**

**Usia : 25 Tahun**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Pekerjaan : Wiraswasta**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

MAG mengungkapkan bahwa stigma atau pertanyaan seperti “*Kapan punya anak?*” sudah menjadi hal yang sering ia dengar, terutama ketika berkumpul bersama keluarga besar atau teman-teman. Ia mengatakan, “*Stigma seperti ‘Kapan punya anak?’ selalu ada saat kumpul bersama keluarga maupun teman. Pertanyaan lain juga ada, seperti tentang tuduhan ada masalah pribadi.*”

Selain pertanyaan umum tersebut, informan juga sering menerima pertanyaan yang lebih spesifik dan kadang mengandung prasangka, seperti “*Jangan-jangan ada masalah kenapa belum punya anak juga?*” Ungkapan-ungkapan semacam ini, meski kadang disampaikan dengan

---

<sup>11</sup> AK, IRT, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 24 September 2025.

nada bercanda, tetap dapat menimbulkan tekanan sosial yang tidak disadari oleh orang yang menanyakannya.

Menanggapi hal itu, MAG memilih untuk tetap bersikap tenang dan tidak memperpanjang pembicaraan. *“Saya menanggapinya dengan santai. Kadang saya jelaskan baik-baik bahwa kami sedang mempersiapkan diri,”* ujarnya. Sikap terbuka dan tenang menjadi caranya menjaga hubungan baik tanpa menimbulkan konflik.

Pada awalnya, MAG mengakui bahwa pertanyaan dan stigma dari lingkungan sekitar sempat memengaruhinya. Namun, seiring waktu, ia belajar untuk lebih tenang dan tidak mudah terbawa perasaan. *“Awalnya sedikit terpengaruh, tapi lama kelamaan tidak lagi,”* katanya.

Menariknya, MAG justru menilai bahwa pengalaman menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa dampak positif. *“Menurut saya, pengaruhnya lebih ke arah positif. Stigma itu justru berdampak positif karena membuat kami makin solid, saling menguatkan, dan terus belajar untuk mempersiapkan diri,”* ungkapnya

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut.

Dari sisi keluarga, MAG merasa beruntung karena orang tua dan saudara kandungnya dapat memahami keputusan mereka. Ia

menjelaskan bahwa setelah dijelaskan dengan baik, keluarga inti menerima dan tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. “*Keluarga inti (orang tua & saudara) menerima keputusan kami setelah dijelaskan. Fokus kami adalah menjaga silaturahmi,*” katanya.

Lebih lanjut, MAG menjelaskan alasan utama di balik keputusan untuk menjalani kehidupan *childfree*. Ia memandang anak sebagai amanah besar dari Allah yang harus dijaga dan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. “*Anak adalah amanah besar dari Allah. Kami menunda karena ingin siap secara mental, finansial, dan spiritual agar bisa menjadi orang tua yang baik dan mendidik anak sesuai syariat Islam,*” tuturnya penuh keyakinan.

Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari diskusi terbuka dengan pasangan. “*Ide ini datang dari diskusi terbuka kami berdua. Kami khawatir tidak bisa menjadi teladan yang baik dan tidak bisa mendidik anak secara maksimal,*” jelasnya. Walaupun keluarga besar tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan, ia menyadari bahwa tanggung jawab terhadap keluarga besar tetap menjadi pertimbangan. “*Tidak. Tapi kami menyadari, punya anak itu berarti ada tanggung jawab juga terhadap keluarga besar, baik dari segi waktu maupun finansial. Jadi, kami ingin memastikan semua aspek itu sudah kami pertimbangkan dengan matang,*” tambahnya.

MAG juga menuturkan kekhawatiran yang mereka rasakan jika terlalu tergesa-gesa memiliki anak. “*Kami khawatir tidak bisa mendidik*

*anak sesuai syariat, khawatir tidak bisa menjadi teladan yang baik, dan khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka secara lahir dan batin. Punya anak itu amanah besar dari Allah,” ucapnya dengan nada penuh kesadaran.*

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

### **3. Informan Banjarmasin Tengah**

#### **a. Masyarakat I**

**Nama : EK**

**Usia : 24 Tahun**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Pekerjaan : Pengajar Bimbingan Belajar**

Terkait rumusan masaalah pertama, berdasarkan wawancara dengan EK, diketahui bahwa pandangan sosial terhadap pasangan yang menunda memiliki anak bersifat ambivalen: di satu sisi diakui sebagai hak pasangan, namun di sisi lain tetap dibayangi oleh norma budaya dan religius yang menganggap anak sebagai tujuan penting dalam perkawinan. EK menyatakan bahwa, “*pasangan menikah tidak harus*

---

<sup>12</sup> MAG, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Selatan, 24 September 2025.

*segera memiliki anak, namun ada baiknya memiliki perencanaan bahwa akan memiliki anak meski dengan menunda terlebih dahulu,”* karena anak dipandang sebagai “*penerus kita di masa depan*” dan juga bagian dari tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu melahirkan “*keturunan yang sholeh atau shalehah.*”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun penundaan kehamilan dapat diterima, norma sosial tetap mengharapkan bahwa pasangan menikah pada akhirnya akan memiliki anak. Dengan kata lain, masyarakat masih menempatkan keturunan sebagai indikator kelengkapan dan keberhasilan sebuah pernikahan, meskipun menyadari bahwa kondisi setiap pasangan berbeda, baik dari segi ekonomi, mental, maupun kesehatan.

Dalam praktik sosial sehari-hari, stigma tersebut muncul dalam bentuk pertanyaan dan tekanan verbal yang relatif umum. EK menjelaskan bahwa pasangan yang belum memiliki anak biasanya akan ditanya, “*kapan punya anak?*”, “*kok menunda sih kan umur sudah cukup?*”, dan bahkan diberi saran-saran supaya segera diberikan keturunan. Bentuk pertanyaan semacam ini, meskipun sering dianggap basa-basi, tetap mencerminkan ekspektasi sosial bahwa pasangan yang telah menikah seharusnya segera memiliki anak.

Namun demikian, EK juga menunjukkan sikap empatik terhadap pasangan yang memilih menunda atau tidak memiliki anak. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut pada dasarnya merupakan hak

masing-masing pasangan dan tidak boleh dipaksakan. Menurutnya, “*ingin memiliki anak atau tidak itu hak dan pilihan masing-masing pasangan, kita tidak bisa memaksakan, karena setiap pasangan mungkin memiliki alasan tersendiri untuk memilih keputusan tersebut.*”

Meski begitu, secara emosional EK mengaku merasa sedih jika ada pasangan yang benar-benar tidak ingin memiliki anak. Ia menyampaikan bahwa, “*saya pribadi sedih sih jika ada pasangan yang tidak ingin memiliki anak, sedang di luar sana banyak orang yang berjuang untuk memiliki keturunan.*” Pernyataan ini menunjukkan adanya dimensi moral dan emosional dalam stigma masyarakat, di mana keinginan untuk tidak memiliki anak dipandang sebagai sesuatu yang kurang ideal, bahkan disayangkan.

Dalam hal sikap sosial, EK menilai bahwa pasangan yang menunda atau tidak memiliki anak tidak seharusnya ditegur atau disudutkan. Ia menyatakan, “*tidak perlu ditegur karena takut menyinggung perasaannya,*” sebab alasan mereka sering kali tidak diketahui oleh orang lain. Nasihat baru dianggap pantas jika memang diminta oleh pasangan yang bersangkutan, dan itupun harus disampaikan “*tanpa menyinggung ataupun menyudutkan keputusannya.*”

Secara keseluruhan, pandangan EK menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap pasangan yang menunda atau tidak memiliki anak tidak selalu bersifat agresif, tetapi tetap hadir dalam bentuk ekspektasi normatif, pertanyaan sosial, dan penilaian moral tersirat. Meskipun

secara prinsip keputusan pasangan dihormati, norma sosial dan religius yang mengagungkan keturunan tetap membentuk cara masyarakat memandang dan menilai pilihan hidup pasangan tersebut.<sup>13</sup>

**b. Masyarakat II**

**Nama : P**

**Usia : 30 Tahun**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Pekerjaan : Wiraswasta**

Sebagai jawaban dari rumusan masalah pertama, wawancara dengan P menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memahami bahwa keputusan memiliki anak sangat bergantung pada kesiapan dan kondisi masing-masing pasangan. P menyatakan bahwa, “*tergantung situasi dan keadaan... mau punya anak dulu atau belum itu tergantung kesiapan masing-masing pasangan.*” Pandangan ini mencerminkan adanya pengakuan bahwa setiap keluarga memiliki konteks dan pertimbangan yang berbeda dalam menentukan waktu yang tepat untuk memiliki anak.

Dalam sikap personalnya, P menunjukkan toleransi terhadap pasangan yang menunda memiliki anak. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut seharusnya tidak langsung dinilai karena orang luar tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Menurutnya, “*biasa aja, karena*

---

<sup>13</sup> EK, Pengajar Bimbingan Belajar, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 30 Desember 2025

*kita tidak tau keadaan mereka, apa alasannya menunda.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa informan memandang penundaan sebagai ranah privat yang tidak semestinya menjadi bahan penghakiman publik.

Namun demikian, dalam praktik sosial sehari-hari, stigma tetap muncul dalam bentuk candaan, sindiran, dan bahkan bullying terselubung. P mengungkapkan bahwa pasangan yang menunda sering mendapat komentar seperti, “*ih kenapa menunda tuh, jaka langsung aja. nyaman beanakan, rami,*” atau bahkan “*setengah membully setengah becanda, bisa mandul nih.*” Ungkapan ini menunjukkan bahwa meskipun dibungkus dengan humor, pesan yang disampaikan tetap mengandung penilaian negatif dan tekanan sosial agar pasangan segera memiliki anak.

Terkait apakah pasangan yang menunda perlu dinasihati, informan secara tegas menolak adanya intervensi sosial. Ia menyatakan, “*ga perlu, biarin aja karena mereka yang menjalani dan hal itu kan tidak mengganggu kita.*” Pandangan ini mencerminkan sikap menghormati batas privasi dan otonomi pasangan dalam menentukan kehidupan keluarganya.

Secara umum, P menilai bahwa menunda memiliki anak adalah sesuatu yang wajar, baik karena kondisi yang tidak memungkinkan maupun karena pasangan memang belum siap. Ia menegaskan bahwa, “*wajar jika kondisi tidak memungkinkan, atau emang belum mau... kada kawa kita menyalahkan orang yang hendak menunda.*”

Dengan demikian, meskipun stigma dalam bentuk sindiran dan candaan masih muncul di lingkungan sosial, terdapat pula kesadaran di kalangan masyarakat bahwa keputusan menunda kehamilan adalah pilihan personal yang tidak seharusnya dihakimi secara sepihak.<sup>14</sup>

### **c. Pasangan I**

**Nama: AA**

**Usia: 29 Tahun**

**Jenis Kelamin: Perempuan**

**Pekerjaan: IRT**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

AA mengaku bahwa dirinya pernah mendapatkan pertanyaan seputar rencana memiliki anak setelah menikah. Dengan nada tenang, ia mengatakan, “*Ya, pernah.*” Pertanyaan yang muncul pun hampir selalu sama dan berulang, seperti “*Kapan punya anak?*”, “*Sudah isi kah?*”, atau “*Hamil lah?*” yang menurutnya sudah menjadi semacam “basa-basi sosial” di lingkungan tempat tinggalnya.

Meski sering menerima pertanyaan semacam itu, AA berusaha menanggapinya dengan santai. Ia biasanya menjawab ringan, “*Belum,*

---

<sup>14</sup> P, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 30 Desember 2025

*mungkin belum diberi,”* meski dalam hati ia sadar bahwa alasan sebenarnya adalah karena ia dan suami memang memilih untuk menunda. “*Menanggapi dengan santai... padahal emang menunda,”* ujarnya sambil tersenyum.

Menurutnya, keluarga dan kerabat dekat kadang ikut memberi saran agar cepat hamil, meskipun tidak sampai menekan. Ia menceritakan, “*Keluarga dan kerabat menyarankan minum jamu dan makan buah tertentu biar cepat hamil. Disuruh makan daging kalo mau dapat anak laki-laki.*” Namun, berbeda dengan mereka, masyarakat sekitar justru cenderung tidak terlalu ikut campur. “*Masyarakat sekitar biasa aja, cuma basa-basi,*” tambahnya.

Meski sering mendengar pertanyaan dari orang-orang sekitar, AA menegaskan bahwa hal itu tidak memengaruhi dirinya secara signifikan. “*Tidak terpengaruh,*” katanya singkat. Ia memilih untuk tidak ambil pusing terhadap komentar atau anggapan orang lain.

AA menilai bahwa situasi tersebut tidak memberikan dampak besar terhadap kehidupannya. “*Netral. Tidak positif, tidak negatif,*” ucapnya menutup percakapan

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut.

Alasan di balik keputusan menunda anak, menurut AA, cukup kompleks. Ia menyebutkan beberapa faktor utama, yakni ekonomi, kesiapan mental, dan kondisi fisik. *“Ekonomi, kesiapan mental dan fisik (BB naik),”* jelasnya.

Menariknya, keputusan untuk menunda ini merupakan inisiatif pribadi yang kemudian disepakati bersama pasangan. *“Saya sendiri... tidak, hanya keputusan berdua,”* ujarnya. Keputusan tersebut tidak melibatkan keluarga besar, melainkan diambil melalui pertimbangan yang matang antara dirinya dan suami.

AA juga mengungkapkan pandangannya tentang tanggung jawab jangka panjang dalam memiliki anak. Ia menuturkan dengan reflektif, *“Aku memikirkan bagaimana caranya agar keuangan tercukupi hingga si anak menikah dan hidup sendiri, dan bagaimana agar aku dan suami tidak bergantung pada anak ketika dia dewasa nantinya.”* Selain itu, ia juga menyinggung aspek kesehatan mental, dengan kekhawatiran tersendiri, *“Ovt kalau menyakiti anak.”*

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> AA, IRT, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 17 Agustus 2025.

**Nama : MAI**

**Usia : 29 Tahun**

**Jenis Kelamin : Laki-Laki**

**Pekerjaan : CPNS**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

MAI menyampaikan bahwa dirinya sering mendapatkan pertanyaan mengenai rencana memiliki anak sejak menikah. Dengan nada tenang ia menjawab, “*Ya*,” ketika ditanya apakah pernah mengalami hal tersebut.

Pertanyaan yang paling sering muncul adalah “*Kapan punya anak?*”, dan selain itu keluarga besar juga kerap memberi berbagai saran atau tips agar cepat mendapatkan keturunan. “*Pertanyaan ‘Kapan punya anak?’ juga sering diberi tips oleh keluarga besar agar cepat punya anak*,” ujarnya.

Dalam menghadapi berbagai komentar tersebut, MAI memilih untuk menanggapinya dengan cara yang sederhana dan sopan. Ia biasanya hanya tersenyum dan mengiyakan semua ucapan yang datang, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. “*Cuma senyum sambil saya iyakan semua perkataan mereka*,” katanya sambil tertawa kecil.

Ketika diminta menggambarkan dampak dari situasi ini, MAI mengaku bahwa pertanyaan dan tekanan sosial tersebut membawa pengaruh negatif terhadap dirinya. Ia merasa terbebani secara mental oleh ekspektasi dan komentar yang datang. “*Negatif, menambah beban pikiran,*” katanya.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut.

MAI kemudian bercerita bahwa ayahnya, semasa hidup, juga pernah menyinggung keinginannya untuk segera memiliki cucu. Meski tidak pernah memaksa secara langsung, hal itu tetap meninggalkan kesan tersendiri. “*Masih asing khususnya bapak saya, sewaktu masih hidup secara tersirat sering menyinggung ingin memiliki cucu,*” tuturnya.

Ketika ditanya mengenai alasan menjalani kehidupan *childfree*, MAI menjelaskan bahwa ia dan istrinya masih merasa belum siap, baik dari segi mental maupun situasi hidup. “*Belum siap, masih ingin bersenang-senang berdua dengan istri,*” jelasnya dengan jujur. Ia menambahkan bahwa keputusan untuk menunda ini merupakan kesepakatan bersama dengan istrinya. “*Istri,*” katanya singkat, menegaskan bahwa mereka berdua sama-sama berperan dalam keputusan tersebut.

Berbeda dengan beberapa informan lain, MAI menyebutkan bahwa keputusan menunda anak tetap memiliki kaitan dengan keluarga besar.

“Ya, ada kaitannya,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa faktor dukungan keluarga juga memengaruhi pertimbangan mereka, terutama karena kondisi keluarga yang unik. “*Karena saya sudah tidak memiliki orang tua perempuan, begitu juga dengan istri. Kami juga tidak memiliki saudara perempuan, sehingga kemungkinan sulit membesarkan anak jika kami sama-sama bekerja,*” jelasnya dengan nada reflektif.

Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam dirinya kadang muncul perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia ingin menunda karena belum siap; di sisi lain, ia ingin memenuhi harapan ayahnya yang sempat ingin menimang cucu. “*Ya, terkadang saya ingin menunda tapi di sisi lain saya juga ingin memiliki anak untuk memenuhi ekspektasi orang tua saya yang laki-laki,*” ungkapnya dengan nada sendu.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

#### **d. Pasangan II**

**Nama : N**

---

<sup>16</sup> MAI, CPNS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 17 Agustus 2025.

**Usia : 23 Tahun**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Pekerjaan : Wiraswasta**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

N mengakui bahwa dirinya pernah menerima pertanyaan seputar rencana memiliki anak setelah menikah. Dengan nada ringan, ia menjawab singkat, “*Pernah.*” Pertanyaan yang datang pun biasanya berupa ungkapan khas daerah yang bernada setengah bercanda namun bermakna menekan, seperti “*Pabila bisi? Tampulu masi anum, baik lakas,*” yang berarti ajakan untuk segera memiliki anak mumpung masih muda.

Menanggapi hal itu, N memilih untuk menjawab dengan sederhana dan tanpa perdebatan. “*Jawab nanti-nanti aja, karena masih belum siap,*” ujarnya sambil tersenyum. Ia berusaha menahan diri agar tidak tersinggung dengan pertanyaan yang sebenarnya cukup pribadi itu.

Meskipun sering mendapatkan pertanyaan seputar anak, N menegaskan bahwa hal itu tidak memengaruhi perasaannya secara signifikan. “*Tidak memengaruhi sama sekali,*” katanya singkat. Namun, ia juga mengakui bahwa secara emosional, pertanyaan tersebut

terkadang terasa menekan. “*Negatif, karena kaya menggasak banar padahal diri belum siap,*” ungkapnya

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut

Ketika ditanya mengenai sikap lingkungan sekitar, N menyebut bahwa keluarga dan kerabat dekat tidak terlalu mempermasalahkan keputusan mereka. “*Keluarga dan kerabat biasa aja. Masyarakat sekitar pun demikian,*” katanya, menandakan bahwa lingkungannya cukup terbuka dan tidak banyak menekan pasangan muda seperti dirinya.

Alasan utama menjalani kehidupan *childfree*, menurut N, berakar pada kesiapan mental dan ekonomi. Ia ingin menikmati lebih dulu kebersamaan dengan pasangan tanpa beban tanggung jawab sebagai orang tua. “*Belum siap mental, ekonomi. Ingin menikmati masa pacaran halal,*” ungkapnya dengan nada santai namun jujur.

Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dengan pasangan. “*Sepakat berdua,*” katanya tegas. Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini murni diambil oleh mereka berdua tanpa campur tangan dari pihak keluarga. “*Keputusan berdua aja,*” tambahnya.

Ketika membahas faktor yang menjadi pertimbangan dalam menunda kehamilan, N menekankan aspek finansial dan tanggung jawab pengasuhan. Ia merasa bahwa kesiapan finansial adalah kunci sebelum memutuskan untuk memiliki anak. “*Finansial, belum siap merawat anak,*” ujarnya.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

**Nama : MS**

**Usia : 22 Tahun**

**Jenis Kelamin : Laki-Laki**

**Pekerjaan : Wiraswasta**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

MS mengaku bahwa dirinya pernah menerima pertanyaan seputar rencana memiliki anak setelah menikah. Pertanyaan yang muncul

---

<sup>17</sup> N, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 23 Agustus 2025.

umumnya disampaikan dengan nada bercanda, namun tetap menyiratkan dorongan untuk segera memiliki anak. Ia menirukan beberapa ungkapan yang sering didengar, seperti “*Langsung aja bisa*,” dan “*Jangan dilawas-lawasi*,” yang bermakna agar tidak menunda-nunda waktu untuk memiliki keturunan.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, MS memilih untuk membalasnya dengan candaan pula. Ia mengatakan, “*Menanggapi dengan candaan, masih hendaklah berdua, karena kalau ada anak kan harus fokus ke anak*.” Jawaban tersebut disampaikannya agar suasana tetap ringan tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau kesan menolak norma sosial.

Meskipun sering mendapatkan pertanyaan dari orang sekitar, MS mengaku tidak merasa terganggu. Ia memilih untuk menanggapinya dengan santai karena menurutnya hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar di masyarakat. “*Tidak terpengaruh, dibawa santai karena sudah hal lumrah*,” ujarnya.

Bagi MS situasi ini tidak terlalu memberikan dampak besar terhadap kehidupannya. “*Netral saja*,” katanya tenang.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut.

Terkait reaksi dari lingkungan sekitar, MS menyampaikan bahwa keluarga dan kerabatnya cenderung menghargai keputusan mereka. “*Keluarga kerabat menghargai atas keputusan ini,*” ujarnya dengan nada lega, menunjukkan bahwa dukungan dari lingkungan terdekat cukup besar sehingga ia tidak merasa tertekan.

Alasan utama di balik keputusan menjalani kehidupan *childfree*, menurutnya, berhubungan dengan kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab dalam mengurus anak. Ia juga menambahkan bahwa dirinya dan pasangan masih ingin menikmati waktu berdua terlebih dahulu. “*Belum siap mental, ekonomi, belum siap mengurus anak, masih ingin menikmati berdua,*” tuturnya jujur.

Keputusan untuk menunda kehamilan sepenuhnya diambil oleh dirinya dan pasangan tanpa campur tangan dari pihak keluarga. Ia menegaskan hal ini dengan berkata, “*Keputusan berdua saja,*” dan kembali menambahkan, “*Keputusan berdua juga,*” untuk menekankan bahwa keputusan ini benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai faktor yang memengaruhi keputusan tersebut, MS menjelaskan bahwa persoalan finansial dan kesiapan untuk merawat anak menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan

kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

#### **4. Informan Banjarmasin Barat**

##### **a. Masyarakat I**

**Nama : SH**

**Usia : 56 Tahun**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Pekerjaan : IRT**

Jawaban untuk rumusan masalah pertama didapat dari wawancara bersama SH yang memperlihatkan dengan sangat jelas kuatnya stigma masyarakat Banjar terhadap pasangan yang menunda memiliki anak. SH menilai bahwa pasangan yang sudah menikah seharusnya segera memiliki keturunan karena jika terlambat dapat berdampak pada kesuburan. Ia menyatakan bahwa “*supaya cepat dapat keturunan. kalonya lambat bisa karing peranakan atau mandul.*” Pandangan ini menunjukkan adanya keyakinan bahwa menunda kehamilan tidak hanya menyimpang dari norma, tetapi juga berisiko secara biologis dan dianggap merugikan pasangan itu sendiri.

Dalam perspektif SH, menunda memiliki anak bahkan dipandang sebagai keputusan yang sangat merugikan. Ia mengatakan, “*rugi banar bedudi-dudi beanak. pas tuha kena ngalih beranak dan*

---

<sup>18</sup> MS, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 23 Agustus 2025.

*menggaduhnya.*” Pernyataan ini mencerminkan keyakinan bahwa semakin tua seseorang, semakin berat proses melahirkan dan membesarkan anak, sehingga penundaan dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional dan tidak bertanggung jawab.

Stigma tersebut juga tampak kuat dalam bentuk tekanan verbal yang diberikan kepada pasangan yang belum memiliki anak. SH menyebutkan bahwa pasangan sering ditanya dengan nada mendesak seperti, “*napa kada beanak?*”, “*lawas dah kawin,*”, “*baik lakas-lakas bisi anak,*” dan bahkan peringatan seperti “*kalopina selajur kada kawa beanak.*” Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya bertanya, tetapi juga memberi tekanan dan rasa takut akan kemungkinan mandul sebagai bentuk kontrol sosial.

Tidak hanya itu, SH juga berpendapat bahwa pasangan yang menunda memiliki anak perlu diberi nasihat agar “sadar”. Ia mengatakan bahwa mereka perlu diingatkan dengan kalimat seperti, “*ikam belelambat apalagi dicari? rezeki pasti ada.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan SH, alasan ekonomi atau kesiapan hidup tidak dianggap sah untuk menunda kehamilan, karena anak dipandang sebagai pembuka rezeki, bukan sebagai beban.

Lebih jauh, SH bahkan memandang bahwa menunda atau tidak ingin memiliki anak adalah sesuatu yang tidak wajar dan bertentangan dengan tujuan pernikahan. Ia menegaskan, “*kada wajar. beapa kawin mun kada hendak beanak? maka tujuan orang kawin untuk meneruskan*

*keturunan.*” Pernyataan ini mencerminkan norma budaya dan religius yang sangat kuat bahwa esensi utama pernikahan adalah melahirkan keturunan.

Secara keseluruhan, wawancara dengan SH menunjukkan bentuk stigma yang paling tegas dan normatif. Pasangan yang menunda memiliki anak dipandang menyimpang dari kodrat, melanggar tujuan pernikahan, dan bahkan dianggap mengancam keberlanjutan garis keturunan. Tekanan sosial dalam bentuk nasihat, peringatan, dan penilaian moral menunjukkan bagaimana norma sosial masyarakat Banjar berfungsi sebagai alat kontrol yang kuat terhadap pilihan reproduksi pasangan menikah.<sup>19</sup>

#### **b. Masyarakat II**

**Nama : MIP**

**Usia : 29 Tahun**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Pekerjaan : Swasta**

Berdasarkan wawancara dengan MIP, terlihat bahwa stigma masyarakat terhadap pasangan yang menunda memiliki anak masih sangat kuat, meskipun secara personal MIP justru memiliki pandangan yang lebih permisif dan kritis terhadap norma tersebut. MIP berpendapat bahwa pasangan yang baru menikah seharusnya diberi ruang untuk

---

<sup>19</sup> SH, IRT, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Barat, 30 Desember 2025

menikmati masa awal pernikahan tanpa tekanan untuk segera memiliki anak. Ia menyatakan, *“harusnya santai dulu sih, nikmati masa-masa berdua dulu biar bisa jalan-jalan tanpa ada distraksi dari anak.”*

Pandangan ini menunjukkan bahwa MIP melihat penundaan kehamilan sebagai fase yang wajar dan bahkan sehat dalam membangun kedekatan emosional pasangan.

Terkait sikap terhadap pasangan yang memilih menunda atau tidak memiliki anak, MIP menegaskan bahwa keputusan tersebut seharusnya dihormati dan dibicarakan secara dewasa. Ia menyampaikan, *“saya menghormati keinginan pasangan dan selebihnya bisa didiskusikan mengapa dan kenapanya.”* Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif MIP, keputusan memiliki anak merupakan hasil dari dialog dan kesepakatan pasangan, bukan sesuatu yang patut dihakimi oleh orang luar.

Namun, dalam realitas sosial, MIP mengakui bahwa stigma tetap hadir dalam bentuk label dan penilaian yang merendahkan. Ia menyebutkan bahwa pasangan yang belum memiliki anak sering *“dibilang mandul atau belum lengkap pernikahannya.”* Ungkapan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat, pernikahan tanpa anak dianggap belum sempurna, sehingga pasangan yang menunda kehamilan berpotensi mengalami delegitimasi sosial terhadap status perkawinannya.

MIP juga mengkritik keras praktik menasihati atau menekan pasangan yang menunda memiliki anak. Ia mempertanyakan legitimasi moral masyarakat dalam mencampuri urusan privat orang lain dengan mengatakan, “*kenapa perlu dinasehati, emangnya ada yang salah dari keinginan mereka? Konstruksi sosial yang salah.*” Pernyataan ini mencerminkan kesadaran kritis terhadap norma sosial yang memaksa pasangan mengikuti pola hidup tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi dan pilihan pribadi mereka.

Lebih lanjut, MIP menilai bahwa menunda kehamilan justru merupakan pilihan yang lebih bertanggung jawab dibandingkan memiliki anak tanpa kesiapan. Ia menyatakan secara tegas bahwa hal tersebut lebih baik “*daripada punya anak tapi ga bisa ngasih yang terbaik dan akhirnya jadi sampah masyarakat.*” Pernyataan ini menegaskan bahwa dari sudut pandangnya, kualitas pengasuhan jauh lebih penting daripada sekadar memenuhi tuntutan sosial untuk memiliki anak.

Secara keseluruhan, wawancara dengan informan keenam memperlihatkan bahwa meskipun stigma masyarakat masih kuat—terutama dalam bentuk label seperti “mandul” atau “tidak lengkap”—terdapat pula suara kritis di tengah masyarakat yang menilai bahwa norma tersebut merupakan konstruksi sosial yang tidak adil dan perlu dipertanyakan. Pandangan ini menunjukkan adanya dinamika dan

pergeseran dalam cara sebagian masyarakat memaknai keluarga, pernikahan, dan pilihan untuk menunda memiliki anak.<sup>20</sup>

### **c. Pasangan I**

**Nama : QA**

**Usia : 27 Tahun**

**Jenis kelamin : Perempuan**

**Pekerjaan saat ini : IRT**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

QA mengaku bahwa dirinya pernah menerima berbagai pertanyaan dari keluarga dan lingkungan sekitar terkait rencana memiliki anak setelah menikah. Pertanyaan-pertanyaan yang datang umumnya bernada ingin tahu, seperti “*Kapan punya anak?*”, “*Maunya berapa anak?*”, hingga “*Kenapa jadi menunda momongan?*” yang menurutnya cukup sering terdengar di berbagai kesempatan.

Saat ditanya bagaimana ia menanggapi pertanyaan tersebut, QA menjelaskan bahwa dirinya memilih untuk bersikap santai. Namun, ia juga tidak menampik bahwa kadang muncul sedikit tekanan batin akibat pertanyaan yang terus berulang. “*Saya menanggapi pertanyaan*

---

<sup>20</sup> MIP, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Barat, 30 Desember 2025

*tersebut biasa-biasa aja sih, tapi terkadang sedikit menjadi beban pikiran,”* ungkapnya sambil tersenyum.

Menurut QA, sikap dan pandangan orang-orang di sekitarnya terhadap keputusan menunda anak beragam. Sebagian besar keluarga dan teman-temannya bisa memahami alasan yang ia dan pasangannya ambil. *“Mereka memaklumi dan memahami dengan keputusan yang diambil,”* jelasnya. Namun, ia juga menyebut bahwa ada sebagian kecil yang menilai keputusan tersebut secara negatif. *“Walau ada sebagian dari mereka yang menganggap menunda anak dianggap egois,”* tambahnya.

Ketika ditanya apakah pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat memengaruhi kondisi psikologisnya, QA mengaku tidak terlalu terganggu. *“Tidak terlalu mempengaruhi psikologis, paling cuma merasa kesepian saat sendiri di rumah,”* katanya dengan nada ringan.

Menariknya, QA juga menilai bahwa keputusan menjalani kehidupan *childfree* memiliki dua sisi: positif dan negatif. Ia menjelaskan dengan reflektif, *“Ada positif dan negatifnya juga.”* Menurutnya, sisi positif dari keputusan ini adalah memiliki waktu untuk menstabilkan emosi dan kondisi finansial, serta mempersiapkan pendidikan anak dengan lebih baik. *“Positifnya: menstabilkan emosional, finansial, persiapan pendidikan untuk anak,”* ujarnya. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan tersebut dapat menimbulkan risiko lain di masa depan. *“Negatifnya: berkurangnya*

*kesuburan karena faktor umur, berpotensi berisiko kehamilan saat usia lanjut, risiko kelahiran prematur,” ucapnya bijak.*

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut

Ketika menjelaskan alasan utama di balik keputusan tersebut, QA menuturkan bahwa dirinya dan pasangan masih ingin menikmati waktu berdua terlebih dahulu. Ia juga menilai bahwa kesiapan mental dan emosional menjadi hal penting sebelum memiliki anak. “*Masih ingin menikmati waktu berdua bersama pasangan, saling mengenal satu sama lain. Belum siapnya mental untuk mengurus anak, emosional masih belum stabil, dan finansial yang belum stabil,*” paparnya dengan jujur.

Keputusan untuk menunda anak merupakan hasil kesepakatan bersama antara dirinya dan pasangan.. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak melibatkan keluarga besar atau pihak lain.

QA menambahkan bahwa kekhawatiran terbesarnya adalah terkait kesiapan mental dan emosional yang belum stabil, karena hal itu dapat berdampak pada proses pengasuhan anak di kemudian hari. “*Yang dikhawatirkan adalah kurang siapnya mental dan emosional yang kurang stabil, dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak,*” tuturnya.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

**Nama : M**

**Usia : 32 Tahun**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Pekerjaan : Pedagang**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

M mengawali ceritanya dengan senyum santai ketika ditanya tentang pertanyaan seputar anak. Ia mengaku bahwa dirinya sudah terbiasa mendengar pertanyaan seperti itu dari keluarga maupun teman-teman. Dengan nada ringan ia mengatakan, “*Tak terbayang kalau ditanya kapan punya anak, intinya insyaallah aja.*” Ucapan itu menggambarkan penerimaannya yang penuh ketenangan terhadap topik yang sering kali menjadi tekanan bagi sebagian orang.

---

<sup>21</sup> QA, IRT, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Barat, 25 September 2025.

Selain pertanyaan tentang anak, M juga mengaku kadang mendapatkan komentar lain yang lebih bersifat bercanda. “*Kadang ditanya kapan nambah istri lagi*,” katanya sambil tertawa kecil. Bagi M, candaan semacam itu tidak perlu ditanggapi serius. Ia memilih untuk tetap bersikap santai dan tidak mengambil hati. “*Tanggapan saya happy aja, nggak bikin pusing, santai*,” ujarnya.

Saat ditanya tentang pandangan keluarga dan masyarakat sekitar, M menjawab bahwa sejauh ini mereka bersikap biasa saja dan tidak memberikan tekanan apa pun. “*Biasa aja*,” ucapnya singkat.

Ketika membahas tentang berbagai pertanyaan yang datang dari lingkungan sekitar, M hanya menanggapinya dengan tenang. Ia menyebut bahwa pertanyaan seperti itu sudah menjadi hal yang biasa didengar sejak dulu. “*Dari berbagai banyak pertanyaan dari kawan-kawan, keluarga, saudara-saudara, teman-teman, sebenarnya pertanyaan ini sudah sering didengar sejak masih remaja*,” katanya menutup pembicaraan

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut

Mengenai alasan belum memiliki anak, M menjelaskan bahwa ia dan pasangannya masih ingin menikmati kehidupan rumah tangga yang

baru mereka jalani. “*Untuk saat ini kami masih merasakan indahnya bulan madu. Untuk mempunyai momongan itu apa yang Allah berikan aja,*” tuturnya.

Ia kemudian menambahkan bahwa sebenarnya keputusan untuk menjalani kehidupan *childfree* merupakan hasil kesepakatan bersama antara dirinya dan pasangan. “*Sebenarnya kami sepakat sementara menunda anak dulu, karena ada hal-hal yang kami jalani,*” katanya. Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan pribadi dan tidak melibatkan keluarga besar.

Menariknya, berbeda dari sebagian M lain, ia mengaku tidak memiliki kekhawatiran khusus terkait anak. “*Sebenarnya memang tidak ada yang dikhawatirkan untuk mempunyai anak,*” jelasnya. Ia menegaskan bahwa dalam hal ini, ia dan pasangannya memilih untuk menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. “*Untuk ini, masalah ini kami santai-santai aja sih, karena kami serahkan kepada Allah, apa baiknya,*” ujarnya.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> M, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Barat, 25 September 2025.

#### **d. Pasangan II**

**Nama : K**

**Usia : 24 Tahun**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Pekerjaan : IRT**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

K mengaku bahwa dirinya cukup sering mendapatkan pertanyaan seputar rencana memiliki anak. Pertanyaan tersebut datang tidak hanya dari keluarga, tetapi juga dari teman dan lingkungan sekitar. Ia mencantohkan beberapa kalimat yang kerap didengarnya, seperti “*Sudah isi atau belum?*” dan “*Masih pakai KB kah?*” yang menurutnya sudah menjadi topik umum dalam percakapan sosial setelah menikah.

Ketika ditanya bagaimana ia menanggapi hal tersebut, K menjawab dengan jujur, “*Belum, masih belum siap.*” Ia menyadari bahwa memiliki anak adalah tanggung jawab besar, sehingga ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum memasuki fase itu.

Menariknya, tanggapan dari lingkungan sekitarnya pun beragam. Ia menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang memahami dan mendukung keputusannya untuk menunda, tetapi ada juga yang justru

mendorongnya agar segera memiliki anak. “*Sebagian mendukung, sebagian mendorong untuk segera memiliki anak,*” ujarnya.

Meski demikian, ia menyadari bahwa keputusan tersebut membawa dua sisi positif dan negatif. Ia berkata, “*Negatifnya, saya jadi takut kalau tiba-tiba hamil apakah akan diterima dengan senang hati oleh sebagian yang lain. Tapi kalau tidak hamil, tuntutan dari kerabat yang lain akan terus menerus ada.*” Namun, di sisi lain, ia juga mengakui bahwa keputusan menunda ini justru mendorongnya untuk belajar lebih banyak dan mempersiapkan diri. “*Positifnya, saya jadi lebih mempersiapkan diri mencari tahu tentang ilmu parenting, tentang apa yang dibutuhkan ibu hamil atau si anak itu kelak,*” tutupnya optimis

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut

Ketika membicarakan alasan di balik keputusannya, K menuturkan bahwa ia ingin menikmati masa-masa awal pernikahan dengan pasangannya lebih dulu, sekaligus memperdalam hubungan emosional di antara mereka. Ia berkata, “*Alasannya karena ingin menikmati masa berdua dan lebih mengenali pasangan dulu secara emosional. Takutnya ketika sudah punya anak punya tanggung jawab yang lebih besar lagi, jadi tidak bisa mengontrol emosi.*”

K menambahkan bahwa keputusan untuk menunda anak diambil atas inisiatif dirinya sendiri. Ia juga menyebutkan bahwa keputusan ini sepenuhnya berasal dari dirinya dan tidak ada pengaruh dari keluarga besar. *“Tidak ada, pure dari diri sendiri,”* katanya.

Lebih jauh, ia juga mengungkapkan kekhawatiran pribadi yang cukup mendalam. Ia mengaku takut jika minimnya pengetahuan tentang pengasuhan (*parenting*) akan membuatnya gagal mendidik anak dengan baik. *“Yang saya takutkan dengan minimnya ilmu parenting saya, saya tidak mampu mendidiknya dengan baik atau bahkan memarahinya dengan sengaja,”* ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa faktor ekonomi yang belum stabil menjadi pertimbangan tambahan. *“Kondisi ekonomi yang belum stabil saat itu jadi alasan lain,”* tambahnya.

Perbedaan pandangan dari orang-orang di sekitarnya sempat membuat K merasa bimbang. Ia mengaku sempat mempertanyakan kembali keputusan yang telah diambil. *“Karena perbedaan respon orang-orang di sekitar membuat saya sempat bingung apakah penundaan ini dilanjutkan atau Sudah saja,”* ujarnya dengan nada reflektif.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan

kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

**Nama : MSY**

**Usia : 27 Tahun**

**Jenis Kelamin : Laki-laki**

**Pekerjaan : Swasta**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

MSY menyampaikan bahwa pertanyaan seputar rencana memiliki anak adalah hal yang hampir pasti muncul setelah menikah. Menurutnya, topik mengenai anak sering menjadi bahan obrolan, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sosial.

Pertanyaan yang ia dengar pun beragam, mulai dari yang sederhana hingga yang terkesan menekan. Ia menirukan beberapa di antaranya, seperti “*Kapan punya anak?*” atau “*Dipercepat atau ditunda?*” yang kerap diucapkan dengan nada penasaran.

MSY menjelaskan bahwa pada awalnya, ia dan pasangan memang sempat berencana menunda kehamilan selama beberapa bulan setelah menikah. Namun, karena mendapat banyak masukan dari teman dan

---

<sup>23</sup> K, IRT, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Barat, 20 September 2025.

orang sekitar, akhirnya mereka memutuskan untuk mempercepat.

*“Menanggapinya dengan santai aja. Emang di awal sempat menunda beberapa bulan, cuma banyak saran dari teman bahwa nanti pakai KB itu malah memperlambat, jadi kami percepat,”* jelasnya.

Namun, keputusan tersebut ternyata sempat menimbulkan perbedaan pandangan di lingkungan keluarga. MSY menyebut bahwa tidak semua pihak menyetujui langkah mereka. *“Sangat bertentangan sih ya, di beberapa keluarga saya sangat tidak disarankan,”* ujarnya.

Mengenai dampak sosial dari pertanyaan dan pandangan orang sekitar, MSY mengaku tidak terlalu terpengaruh. *“Tidak berpengaruh sama sekali,”* ujarnya singkat, menunjukkan sikapnya yang cukup kuat dalam menghadapi tekanan sosial tersebut.

Sebagai penutup, MSY menyampaikan pandangannya terhadap stigma *childfree* yang menurutnya masih negatif di masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap pasangan seharusnya memahami kembali hakikat dari pernikahan itu sendiri. *“Menurut saya, dengan adanya stigma itu, khususnya stigma childfree, negatif banget. Dikembalikan lagi tujuan menikah itu apa,”* ucapnya.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut

Ia kemudian bercerita bahwa alasan awal mereka menunda sebenarnya berhubungan dengan kesiapan sang istri. “*Karena kesiapan sang ibu, menunggu, tapi akhirnya dijelaskan bahwa tujuan menikah itu apa. Baru tersadarkan,*” tuturnya, menunjukkan bahwa proses pemahaman itu terjadi secara bertahap dalam rumah tangganya.

Ketika ditanya siapa yang pertama kali memiliki ide untuk menunda kehamilan, MS menjawab bahwa inisiatif itu berasal dari pasangannya. “*Yang punya ide itu dulu awal pasangan,*” katanya. Meskipun begitu, keputusan tersebut tetap dibicarakan bersama, tanpa campur tangan keluarga besar. “*Tidak keluarga besar, cuma kami saja,*” tegasnya.

Lebih lanjut, MSY menjelaskan kekhawatiran yang muncul dalam pikirannya terkait waktu dan usia. Ia menilai bahwa semakin lama menunda, semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi dalam proses pengasuhan anak di masa depan. “*Yang dikhawatirkan dari itu adalah semakin tua kita semakin renta dan semakin susah merawat dan mendidik anak,*” ungkapnya.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> MS, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Barat, 20 September 2025.

## 5. Informan Banjarmasin Utara

### a. Masyarakat I

**Nama : SNM**

**Usia : 30 Tahun**

**Jenis kelamin : Perempuan**

**Pekerjaan : IRT**

Wawancara dengan SNM untuk menjawab rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pasangan yang menunda memiliki anak sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kesiapan hidup. Informan menyatakan bahwa pasangan menikah “*kada mesti*” (tidak harus) langsung memiliki anak, karena keputusan tersebut sangat bergantung pada kondisi keluarga masing-masing. Ia menjelaskan bahwa banyak pasangan menunda karena ingin mencapai kondisi ideal terlebih dahulu, seperti memiliki rumah sendiri atau menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, “*tergantung kondisi ekonomi... atau karna masih kuliah, mau menyelesaikan pendidikan dulu. Orang ada yang mau cepat, ada yang mau menunda.*”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat, penundaan dapat dianggap wajar apabila disertai alasan yang rasional dan realistik terkait kesiapan hidup.

Namun, SNM membedakan antara penundaan yang didasarkan pada kebutuhan objektif dengan penundaan yang dilandasi keinginan bersenang-senang. Ia menyatakan bahwa “*kada jadi masalah kalo*

*menunda karna emang ada kondisi tertentu, ekonomi atau pendidikan,”* tetapi jika menunda hanya untuk “*senang-senang atau istilahnya pacaran halal dulu,*” maka menurutnya sebaiknya anak segera diusahakan. Ia bahkan menceritakan pengalaman di sekitarnya, “*ada kenalan ulun nyoba KB bedahulu... akhirnya belum bisi anak sampai sekarang,*” yang menunjukkan adanya kekhawatiran sosial terhadap risiko biologis dan penyesalan di kemudian hari akibat penundaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, stigma terhadap pasangan yang menunda memiliki anak tampak melalui pertanyaan dan komentar sosial. SNM menyebutkan bahwa pasangan sering ditanya, “*kenapa kada langsung bisi anak?*” atau “*inya kada beanakan masih, kenapa lah.*” Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki ekspektasi kuat bahwa pasangan menikah seharusnya segera memiliki anak, sehingga penundaan perlu dipertanyakan dan dijelaskan.

Mengenai sikap menegur atau menasihati, SNM berpandangan bahwa hal tersebut tergantung pada kondisi pasangan. Jika pasangan memang tidak memungkinkan secara ekonomi atau kondisi hidup, maka “*kita tidak bisa menasehati atau menegur.*” Namun, jika pasangan dianggap tidak memiliki alasan khusus, maka “*sebaiknya dinasehati.*” Ini menunjukkan bahwa dalam norma sosial masyarakat, penilaian moral terhadap penundaan kehamilan bersifat kondisional, tergantung apakah alasan tersebut dianggap sah atau tidak.

Secara keseluruhan, SNM memandang bahwa menunda memiliki anak adalah hal yang “*wajar aja kalo kondisinya tidak memungkinkan*,” tetapi menjadi “*tidak wajar jika alasannya hanya untuk senang-senang dulu*.” Dengan demikian, stigma masyarakat terhadap pasangan yang menunda memiliki anak tidak sepenuhnya menolak penundaan, melainkan menilai dan menghakimi motif di baliknya. Norma sosial tetap bekerja untuk membedakan antara penundaan yang dianggap bertanggung jawab dan penundaan yang dipandang sebagai penyimpangan dari nilai ideal keluarga.<sup>25</sup>

**b. Masyarakat II**

**Nama : LS**

**Usia : 26 tahun**

**Jenis Kelamin : Perempuan**

**Pekerjaan : Tenaga Pendidik**

Wawancara dengan LS sebagai jawaban rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pasangan yang menunda memiliki anak tidak dapat diseragamkan, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi dan konteks masing-masing keluarga. LS menegaskan bahwa, “*permasalahan segera memiliki anak atau menunda memiliki anak tidak bisa menjadi acuan yang sama untuk semua orang*,” sebab keputusan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor

---

<sup>25</sup> SNM, IRT, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 30 Desember 2025

seperti usia, kesehatan, dan kesiapan tanggung jawab dalam membesarkan anak. Ia bahkan mencontohkan bahwa perempuan yang menikah di usia 30 tahun ke atas tentu berada pada situasi yang berbeda dibandingkan pasangan yang menikah di usia lebih muda.

Lebih jauh, LS menekankan bahwa memiliki anak harus disertai tanggung jawab yang besar, terutama dalam menjamin pendidikan dan kesejahteraan anak. Menurutnya, keputusan untuk menunda atau segera memiliki anak seharusnya kembali pada kondisi ideal setiap keluarga. Ia menyatakan, “*sebagai pasangan suami istri yang bijak tentu memiliki anak harus disertai dengan bentuk tanggung jawab dalam membesarkan anak dan menjamin pendidikannya.*”

Dalam pandangan LS, menunda kehamilan justru dapat menjadi keputusan yang lebih bermoral apabila pasangan belum siap secara ekonomi dan psikologis. Ia bahkan menyebut bahwa melahirkan anak dalam kondisi yang tidak mampu menjamin hak-haknya dapat menjadi bentuk ketidakadilan terhadap anak. Sebagaimana ia ungkapkan, “*melahirkan anak dalam keadaan yang bisa dikatakan kurang mampu baik dari ekonomi keluarga, tidak mampu menjamin pendidikan dan kesehatannya merupakan sebuah kejahanan yang dilakukan tanpa disadari karena tidak bisa memberikan haknya penuh sebagai anak.*”

Terkait sikap sosial di lingkungan sekitarnya, LS menyatakan bahwa stigma tidak selalu kuat, terutama dalam lingkungan keluarga dekat. Ia menyebutkan bahwa justru banyak keluarga yang “*support untuk*

*menunda anak bagi pasangan yang menikah muda dan belum stabil finansialnya serta belum mature dalam problem solvingnya.”* Bahkan secara umum, ia menilai bahwa lingkungannya “*cukup bodo amat terkait masalah pribadi orang lain,*” terutama bagi pasangan yang telah menikah di usia yang matang.

Dalam hal etika sosial, LS berpandangan bahwa mencampuri urusan pasangan terkait memiliki anak merupakan tindakan yang kurang pantas. Ia menegaskan, “*kurang etis kalau kita terlalu mencampuri urusan orang lain apalagi perihal mempunyai anak,*” karena setiap orang memiliki kapasitas dan tanggung jawab masing-masing atas keputusannya. Tidak semua pilihan hidup harus mengikuti keinginan atau rekomendasi orang lain, sebab setiap keputusan memiliki risiko dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pasangan itu sendiri.

Secara keseluruhan, pandangan LS menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap pasangan yang menunda memiliki anak dapat melemah dalam lingkungan yang lebih rasional dan dewasa secara sosial. Meskipun norma tentang pentingnya memiliki anak masih diakui, terdapat pula kesadaran bahwa keputusan tersebut adalah ranah yang sangat personal dan harus disesuaikan dengan kondisi ideal masing-masing keluarga. Dengan demikian, stigma tidak selalu hadir

dalam bentuk tekanan, tetapi bergantung pada tingkat pemahaman dan kedewasaan sosial lingkungan tempat pasangan tersebut berada.<sup>26</sup>

### **c. Pasangan I**

**Nama: MK**

**Usia: 25 Tahun**

**Jenis Kelamin : Laki laki**

**Pekerjaan : Wiraswasta**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

MK mengaku bahwa dirinya cukup sering menerima pertanyaan seputar rencana memiliki anak setelah menikah. Dengan nada datar ia mengatakan, “*Ya, saya menerima. Pertanyaannya biasanya cuma, ‘Kapan punya anak?’*”

Pertanyaan itu, menurutnya, bukan hal baru dan sudah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari ketika bertemu dengan keluarga atau teman. Namun, MK tidak pernah merasa terganggu secara berlebihan. Ia hanya menanggapinya dengan sederhana, “*Saya hanya menanggapi dengan senyuman,*” ujarnya sambil tersenyum kecil, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak ingin memperpanjang topik tersebut.

---

<sup>26</sup> LS, Tenaga Pendidik, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 30 Desember 2025

Ketika ditanya tentang reaksi keluarga dan lingkungan sekitar terhadap keputusannya menjalani kehidupan *childfree*, MK menjawab singkat, “*Biasa saja.*” Tidak ada tekanan atau dorongan kuat dari pihak manapun.

Saat membicarakan tentang pengaruh sosial dari pertanyaan atau stigma yang beredar di masyarakat, MK tampak tenang. Ia menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak memengaruhi dirinya. “*Tidak sama sekali, dan merasa tidak peduli,*” katanya lugas.

Bagi MK, ucapan-ucapan seperti “*Kapan punya anak?*” hanyalah bentuk basa-basi yang tidak perlu terlalu dipikirkan. “*Biasa saja, tidak berpengaruh apa-apa, karena saya orangnya memang tidak suka terlalu memikirkan hal-hal yang kurang penting dan stigma tersebut saya anggap hanya basa-basi orang ketika bertemu,*” ucapnya dengan santai

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut

Ia kemudian menjelaskan alasan utama di balik keputusan untuk menunda kehadiran anak. Keputusan tersebut muncul bukan dari dirinya, melainkan karena mengikuti kemauan sang istri. “*Karena mengikuti kemauan istri,*” katanya. Ia menambahkan bahwa ide untuk

menjalani kehidupan *childfree* memang sepenuhnya berasal dari istri.

“*Tidak, ini murni dari istri saya,*” tegasnya ketika ditanya apakah keputusan tersebut didorong oleh keluarga besar.

Lebih lanjut, MK mengungkapkan beberapa kekhawatiran yang dirasakan istrinya dan juga dirinya sebagai suami. Salah satunya adalah ketakutan belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak di masa depan. Selain itu, ia juga memperhatikan kondisi emosional istrinya. “*Khawatirnya belum bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak, dan khawatir terhadap trauma istri saya terkait pola pengasuhan anak,*” jelasnya dengan nada penuh empati.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

**Nama: AF**

**Usia: 23 Tahun**

**Jenis Kelamin: Perempuan**

**Pekerjaan : IRT**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil

---

<sup>27</sup> MK, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 29 September 2025.

wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

AF mengaku bahwa dirinya cukup sering mendapatkan pertanyaan seputar rencana memiliki anak setelah menikah. Ia menjelaskan bahwa pertanyaan yang paling sering muncul adalah, “*Pakai KB ya? Pakai KB apa?*”

Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu, selama disampaikan dengan cara yang baik. “*Saya jawab dengan santai tentang keadaan yang sebenarnya, jika yang bertanya juga tidak memojokkan terkait pilihan saya,*” ungkapnya.

Sejauh ini, ia merasa bahwa respons dari lingkungan sekitar masih tergolong wajar. “*Sementara ini respon yang saya dapat tidak yang bagaimana-bagaimana, karena pernikahan kami juga masih tergolong baru,*” tambahnya.

Meski berusaha bersikap tenang, AF tidak menampik bahwa komentar orang lain kadang dapat memengaruhi pikirannya. Ia menuturkan, “*Terkadang mempengaruhi, jika yang bertanya juga menceritakan kisah tentang orang-orang sekitarnya yang karena menunda mempunyai anak, ketika sudah siap malah sulit untuk mengandung dikarenakan efek samping KB yang dipakai.*” Ia mengakui bahwa cerita-cerita seperti itu membuatnya sempat bimbang dan khawatir terhadap pilihannya sekarang. “*Hal tersebut juga tidak jarang membuat saya stres,*” tambahnya.

Namun demikian, AF menilai bahwa stigma sosial semacam itu tidak selalu berdampak negatif. Ada kalanya justru memberikan manfaat tersendiri. *“Terkadang ada positif dan ada negatifnya juga. Positifnya, pertanyaan kapan punya anak yang ditanyakan orang-orang kadang juga disertai nasihat-nasihat dari orang yang lebih dulu berpengalaman dalam mengasuh dan membesarkan anak. Hal tersebut menjadi pembelajaran bagi saya di kemudian hari jika mempunyai anak juga. Negatifnya, menurut saya menanyakan hal demikian terlalu masuk ke privasi seseorang sehingga tidak jarang bisa memicu overthinking bagi orang yang ditanya.”* ucapnya tenang.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut

Ketika ditanya mengenai alasan di balik keputusan menjalani kehidupan *childfree*, AF menjelaskan bahwa hal tersebut murni datang dari dirinya sendiri. *“Alasan utamanya karena belum siap, belum siap dalam banyak hal, dan juga sementara ini ingin menikmati masa berdua dengan suami,”* ujarnya. Ia menegaskan bahwa meskipun keputusan tersebut merupakan inisiatif pribadi, keluarga tetap menjadi salah satu pertimbangan yang diperhitungkan. *“Termasuk salah satunya,”* katanya singkat.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan beberapa kekhawatiran yang menjadi alasan utama di balik penundaan tersebut. *“Khawatir atau takut belum siap jadi orang tua dalam memberi parenting yang baik, takut tidak bisa mengontrol emosi terhadap keadaan ketika sudah mempunyai anak, khawatir belum bisa memberi kehidupan yang layak, khawatir dengan lingkungan anak, serta ada ketakutan di masa lalu terkait pola pengasuhan pada anak,”* jelasnya.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

#### **d. Pasangan II**

**Nama: NAR**

**Usia: 24 Tahun**

**Jenis Kelamin: Perempuan**

**Pekerjaan: Guru, IRT**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

---

<sup>28</sup> AF, IRT, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 29 September 2025.

NAR mengaku bahwa ia cukup sering menerima pertanyaan mengenai rencana memiliki anak setelah menikah. Pertanyaan yang datang pun beragam, mulai dari yang terdengar biasa hingga yang terasa agak menyudutkan. “‘Sudah isi lah?’ ‘Memang menunda kah?’ ‘Pakai KB kah?’” ujarnya menirukan beberapa pertanyaan yang kerap ia dengar dari lingkungan sekitar.

Biasanya, ia hanya menanggapi dengan jawaban singkat dan sopan. “*Balum, doakan aja,*” katanya sambil tersenyum. Meskipun diucapkan ringan, jawaban tersebut sebenarnya menjadi bentuk pertahanan halus agar percakapan tidak berlanjut lebih jauh.

Menurut NAR, keluarganya bersikap cukup terbuka terhadap keputusan yang ia dan suaminya ambil. “*Pihak keluarga Alhamdulillah ngikut aja karena yang menjalani kami,*” jelasnya. Namun, ia mengakui bahwa beberapa kerabat sempat menyayangkan keputusan mereka untuk menjalani kehidupan *childfree*.

Meski berusaha memahami setiap komentar yang datang, NAR mengakui bahwa beberapa pertanyaan dari orang lain terkadang membuatnya kesal. “*Kalau yang bertanya orang terdekat saya seperti keluarga atau sahabat-sahabat saya, saya fine fine aja. Lalu menjelaskan maksud dan tujuan menunda ini,*” katanya. “*Tapi kalau yang bertanya orang lain, ibaratnya baru ketemu malah... jar orang Banjar tuh meniwas, ‘hati-hati kalopina beselajur’ itu kadang jadi pikiran dan bikin kesal sih,*” tambahnya.

Ia mengaku bahwa komentar seperti itu sering membuatnya kesal dan berpikir, *“Padahal yang menjalani kita, yang melahirkan kita, yang mengurus kita, yang sakit kita. Kenapa orang lain yang jar orang Banjar tuh bejuju banar hendak meliat kita beisi anak.”*

Ketika ditanya mengenai dampak sosial dan psikologis dari stigma tersebut, NAR menjawab dengan tegas. *“Kalau dari orang-orang bawel pastinya negatif ya. Karena orang-orang bawel tadi menurut saya adalah orang dengan pemikiran yang kuno. Dalam artian kan orang zaman dulu berpikir menikah hanya untuk punya anak. Padahal esensi nikah bukan hanya untuk memiliki keturunan. Memang itu salah satu tujuan menikah, tapi bukan tujuan utama,”* jelasnya.

Bagi NAR, sikap ingin menjalani kehidupan *childfree* bukanlah bentuk penolakan terhadap kodrat, melainkan bagian dari kesadaran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua yang benar-benar siap, baik secara mental maupun finansial.

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut

Ketika diminta menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut, NAR menyampaikan pandangan yang matang dan penuh pertimbangan. *“Pastinya ingin menyiapkan diri karena kami menyadari memiliki anak*

*merupakan tanggung jawab besar dan tentunya perlu persiapan matang untuk kesiapan mental dan finansial. Kami juga ingin mengenal satu sama lain dulu, menghadapi karakter masing-masing dulu sebelum memiliki anak,” ungkapnya.*

Ia menambahkan bahwa keputusan untuk menunda ini merupakan hasil kesepakatan bersama dengan suami. “*Mungkin lebih ke keputusan bersama ini lah, karena kami melihat secara keadaannya saat ini memang masih belum siap memiliki anak,*” katanya. Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini sepenuhnya merupakan keputusan pribadi antara suami dan istri, “*Tidak, keputusan pribadi suami istri.*”

Dalam penjelasannya, NAR menunjukkan pemikiran yang cukup mendalam tentang tanggung jawab menjadi orang tua. Ia mengatakan, “*Anak adalah tanggung jawab besar, anak tidak minta dilahirkan. Anak berhak lahir dengan kehidupan yang layak. Nah jadi kalau kita melahirkan anak tanpa kesiapan mental dan finansial, pastinya akan merugikan anak.*” Ia kemudian mencontohkan kemungkinan yang bisa terjadi jika orang tua belum siap secara emosional, “*Misalnya, kita melahirkan anak tanpa kesiapan mental, nanti anaknya malah dimarahin terus, atau malah terjadi kekerasan fisik yang justru akan membuat si anak kena mental juga.*”

Selain itu, ia juga menyoroti faktor ekonomi yang menurutnya tidak bisa diabaikan. “*Sekarang kita tahu kan, biaya nggak cuma pas melahirkan aja, tetapi juga pas hamil pun perlu biaya untuk memenuhi*

*nutrisinya, terus melahirkan, masa newborn, balita, apalagi kalau dia sudah sekolah. Nah itu kan memerlukan biaya besar,”* jelasnya. Ia menambahkan, *“Makanya kami menunda untuk mempersiapkan hal tersebut karena kami khawatir belum bisa memenuhi kebutuhannya.”*

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

**Nama: MIM**

**Usia: 24 Tahun**

**Jenis Kelamin: Laki-laki**

**Pekerjaan: PNS**

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengaruh stigma masyarakat terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*, hasil wawancara menunjukkan bahwa stigma tersebut memberikan dampak psikologis yang beragam pada setiap informan.

MIM mengungkapkan bahwa dirinya memang pernah mendapatkan pertanyaan seputar rencana memiliki anak, meskipun tidak terlalu sering. Menurutnya, pertanyaan tersebut biasanya datang dari anggota

---

<sup>29</sup> NAR, Guru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 27 September 2025.

keluarga, bukan dari masyarakat luas. Ia menirukan bagaimana biasanya orang bertanya, “*Pabila beanak?*” katanya sambil tersenyum kecil.

Pertanyaan seperti itu dianggapnya sebagai bentuk basa-basi belaka. “*Basa basi aja lah,*” ujarnya santai. Ia menambahkan bahwa pertanyaan yang serupa juga kerap terdengar, seperti, “*Pabila beanak?* atau *'Isi kah dah bininya?'*”

Menanggapi hal tersebut, MIM memilih untuk tetap tenang dan jujur. Ia hanya menjawab singkat, “*Balum lagi, emang rencana menunda,*” katanya dengan nada ringan. Bagi MIM, hal semacam itu tidak perlu dipikirkan secara berlebihan karena sebagian besar orang yang bertanya hanya ingin berbasa-basi. “*Basi-basi aja lah, biasa aja, santai,*” tambahnya.

Meskipun demikian, MIM mengaku tidak merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari keluarga atau orang sekitar. Ia memilih untuk bersikap santai dan tidak mempermasalahkannya. “*Santai aja. Santai aja,*” ucapnya menutup pembicaraan

Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* serta pandangannya dalam perspektif hukum keluarga, hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai pertimbangan rasional yang mendasari keputusan tersebut

Saat ditanya mengenai alasan utama menjalani kehidupan *childfree*, MIM menyampaikan bahwa faktor ekonomi menjadi pertimbangan

utama. Dengan nada realistik ia berkata, “*Darimana uangnya? Darimana uangnya? Duitnya masih kekurangan.*” Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa kesiapan finansial menjadi hal yang penting baginya sebelum memutuskan untuk memiliki keturunan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda tersebut merupakan kesepakatan bersama dengan pasangan. “*Sama-sama aja beimbauan aja,*” tuturnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada campur tangan dari pihak lain dalam keputusan tersebut. “*Kadeda, keputusan berdua saja,*” ujarnya singkat.

Kekhawatiran utama yang disampaikan MIM kembali mengarah pada kondisi ekonomi. Ia menekankan hal tersebut dengan nada jujur, “*Duitnya masih kekurangan,*” katanya sekali lagi.

Dengan demikian, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk menunda kehamilan tidak diambil secara sepihak, melainkan didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kesepakatan bersama yang selaras dengan prinsip musyawarah dalam rumah tangga.<sup>30</sup>

**Tabel 4.1 Matriks Penelitian**

No.	Infor man	Pandangan tentang Menunda Anak dan Tidak Mau Punya Anak	Bentuk Stigma yang Muncul	Sikap terhadap Pasangan <i>Childfree</i>

<sup>30</sup> MIM, PNS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Utara, 27 September 2025.

1.	HU	Boleh jika alasan pendidikan & ekonomi namun tidak boleh jika menolak anak	Larangan KB, tekanan agama	
2.	SNR	Wajar jika karena kesiapan ekonomi dan mental namun tidak wajar jika bertentangan dengan syariat		
3.	APT	Boleh jika ada alasan kuat dan prihatin jika menolak total	Sindiran, doa, suruhan	Setuju menunda.
4.	MRD	Wajar jika ekonomi, mental, karier belum siap namun tidak setuju jika menolak anak	Cibiran: mandul, memalukan	Setuju menunda.
5.	EK	Boleh dengan perencanaan tapi akan sedih jika ada yang tidak mau anak	Pertanyaan & saran halus	Setuju menunda.
6.	P	Wajar sesuai kesiapan dan itu Bukan urusan orang lain	Candaan, sindiran	Setuju menunda.
7.	SH	Harus cepat punya anak karena Sangat tidak wajar untuk menunda apalagi tidak mau punya anak		

8.	MIP	Wajar dan rasional karena sah sah saja sebagai pilihan hidup		
9.	SNM	Wajar jika dengan alasan ekonomi & pendidikan namun tidak wajar jika hanya ingin bersenang-senang		
10.	LS	Sangat wajar, tergantung kondisi ideal keluarga dan tidak memikirkan karena hal tersebut merupakan ranah pribadi		

No.	Infor man	Pertanyaan yang sering diterima	Faktor <i>Childfree</i>	Dampak Psikologis
1.	H	“Kapan punya anak? Si itu 3 bulan kawin sudah isi”.	• Masih kuliah	Awalnya santai, tapi lama-lama merasa kesal bila terus ditanya
2.	LI	“Kapan punya anak?”	• Belum siap	Tidak terlalu terpengaruh dan menanggapi dengan candaan.
3.	Z	“Sudah punya anak lah?”, “Sadang ai sudah bisi anak.”	• Belum mental siap	Tidak terpengaruh, hanya heran mengapa orang lain ikut campur.

4.	AW	“Sudah bisi anak kah?”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istri belum siap</li> </ul>	Awalnya tertekan tapi kemudian terbiasa.
5.	T	“Si itu sudah hamil, ikam kapan?”, “Sudah isi kah?”, “Ngapain kuliah, mending bisi anak aja.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum siap mental emosional</li> </ul>	Merasa terganggu dan sedih karena pertanyaan terus berulang.
6.	A	“Kapan istrinya hamil?”, “Ayo cepat punya anak.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang ilmu parenting</li> </ul>	Tidak terlalu memikirkan omongan orang.
7.	AK	“Pabila jar handak beanak?”, “Apa lagi yang dihadangi?”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum siap fisik dan mental</li> </ul>	Tidak terpengaruh, hanya menilai pertanyaan itu kurang etis.
8.	MAG	“Kapan punya anak?”, “Jangan-jangan ada masalah?”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ingin siap mental, finansial, dan spiritual.</li> </ul>	Awalnya sedikit terpengaruh tapi kemudian menjadi penguat diri.
9.	AA	“Kapan punya anak?”, “Sudah isi kah?”, “Hamil lah?”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi</li> </ul>	Tidak terlalu berpengaruh.
10.	MAI	“Kapan punya anak?”, juga diberi tips agar istri cepat hamil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum siap</li> </ul>	Merasa terbebani ekspektasi keluarga.
11.	N	“Pabila bisi? Tampulu masih anum baik lakas.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum mental siap dan ekonomi</li> </ul>	Merasa tertekan, padahal belum siap.

12.	MS	“Langsung aja bisi.” “jangan dilawas lawasi”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum mental siap dan ekonomi</li> </ul>	Tidak terpengaruh.
13.	QA	“Sudah isi atau belum?”, “Masih pakai KB kah?”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingin menikmati masa berdua</li> </ul>	Kadang bingung dan stres karena cerita orang lain tentang efek KB.
14.	M	“Kapan punya anak?”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menikmati masa berdua</li> </ul>	Menanggapi dengan santai.
15.	K	“Sudah isi atau belum?” “masih pakai KB kah?”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingin menikmati masa berdua</li> </ul>	Merasa dituntut keluarga untuk segera punya anak. Namun jadi lebih semangat membekali diri dengan ilmu parenting
16.	MSY	“Kapan punya anak?” “Dipercepat atau ditunda?”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kesiapan istri</li> </ul>	Tidak terpengaruh sama sekali
17.	MK	“Kapan punya anak?”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti kemauan istri</li> </ul>	Tidak terganggu sama sekali dan tidak peduli
18.	AF	“Pakai KB ya? KB apa?”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum siap jadi orang tua</li> </ul>	Kadang senang karena dapat nasihat orang yang lebih berpengalaman sehingga bisa jadi pembelajaran. Kadang juga memicu overthinking karena sudah

				masuk ranah privasi.
19.	NAR	“Sudah isi kah?”, “Memang menunda kah?”, “Pakai KB kah?”	• Belum mental siap dan finansial	Kesal jika ditanya orang luar, tapi bisa menjelaskan pada orang dekat.
20.	MIM	<i>Pabila beanak?”, “Isi kah dah bininya?”</i>	• Ekonomi	Tidak merasa terganggu.

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti (2025)

## B. Analisis Data

Bagian ini akan menyajikan analisis terhadap data yang telah diuraikan sebelumnya dengan merujuk pada teori-teori yang telah dibahas pada Bab II. Analisis ini disusun untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana stigma masyarakat terhadap pasangan *childfree*, (2) bagaimana stigma tersebut memengaruhi kondisi psikologis pasangan *childfree*, dan (3) apa saja faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk *childfree* serta bagaimana perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, informan masyarakat Banjar dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, dan tingkat pemahaman keagamaan yang beragam. Secara umum, informan dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dari aspek ekonomi, informan berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah hingga menengah. Sementara itu, dari segi pemahaman keagamaan, informan memiliki tingkat religiusitas yang berbeda,

mulai dari pemahaman keagamaan normatif berbasis tradisi hingga pemahaman keagamaan yang lebih reflektif dan kontekstual.

Data hasil wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan membandingkan dan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan. Analisis mengenai stigma masyarakat akan menggunakan teori stigma sosial, tujuan perkawinan, sosiologi hukum untuk melihat bagaimana norma dan pandangan masyarakat Banjar terbentuk serta memengaruhi perilaku sosial terhadap pasangan yang memilih *childfree*, dan teori psikologi perkembangan digunakan untuk melihat bagaimana keputusan menunda anak dapat berdampak pada pencapaian tugas-tugas perkembangan dalam kehidupan pernikahan, seperti kesiapan emosional dan peran sebagai orang tua di masa depan.

Selanjutnya, bagian dampak psikologis akan dianalisis dengan menggunakan teori psikologi sosial. Teori psikologi sosial digunakan untuk memahami bagaimana tekanan dan stigma masyarakat dapat memengaruhi emosi, rasa percaya diri, dan perasaan diterima dalam lingkungan sosial dan teori *maqashid al-syariah* untuk memahami bagaimana dampak tersebut memengaruhi 5 *maqashid al-daruriyat*, diantaranya *hifzh nafs* dan *hifzh 'aql*.

Sementara itu, bagian faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan menjalani kehidupan *childfree* akan dianalisis menggunakan teori *maqashid syari'ah*, *maslahah mursalah*, serta teori perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh

mana keputusan menunda anak dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya menjaga kemaslahatan keluarga dalam bingkai hukum keluarga Islam.

### **1. Analisis stigma masyarakat terhadap pasangan *childfree***

Keputusan pasangan muda untuk menunda memiliki anak pada masa kini dapat dipahami sebagai fenomena yang wajar seiring dengan terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan keluarga. Pada masa lalu, memiliki anak segera setelah perkawinan kerap dipandang sebagai sarana untuk memperkuat ikatan antara suami dan istri serta menjadi penanda stabilitas rumah tangga. Anak dianggap sebagai “pengikat” relasi perkawinan sekaligus simbol keberhasilan membangun keluarga. Namun, dalam konteks sosial kontemporer, fungsi pengikat tersebut tidak lagi sepenuhnya dilekatkan pada kehadiran anak, melainkan pada kualitas relasi suami-istri, kesiapan mental, serta kemampuan membangun komunikasi dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pasangan muda cenderung memandang penundaan kehamilan sebagai bagian dari strategi menata kehidupan rumah tangga secara lebih matang, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap nilai perkawinan atau keturunan itu sendiri. Pergeseran nilai ini menunjukkan bahwa makna memiliki anak dalam perkawinan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh informan masyarakat Banjar, stigma terhadap pasangan yang menunda memiliki anak muncul sebagai konsekuensi dari kuatnya norma sosial yang menempatkan

kelahiran anak sebagai indikator utama keberhasilan perkawinan. Dalam budaya Banjar, menikah tidak dipahami sebagai relasi dua individu semata, tetapi sebagai gerbang menuju reproduksi dan keberlanjutan garis keturunan. Oleh karena itu, pasangan yang belum memiliki anak, terlebih yang menunda secara sadar, kerap dipersepsi belum “sempurna” sebagai keluarga.

Sebagian informan secara eksplisit memaknai tujuan pernikahan sebagai melahirkan keturunan. Dalam pandangan ini, anak bukan hanya rezeki, tetapi juga bukti sah bahwa pernikahan telah menjalankan fungsinya. Menunda kehamilan dipandang berisiko, bahkan dicurigai sebagai bentuk penolakan terhadap sunnah atau keberkahan. Ungkapan seperti “untuk apa kawin kalau tidak mau punya anak” atau “jangan KB dulu” menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai perilaku pasangan, tetapi juga mengaitkannya dengan moralitas dan keberagamaan.

Stigma masyarakat Banjar terhadap pasangan *childfree* sangat dipengaruhi oleh konstruksi budaya lokal yang menempatkan anak sebagai indikator keberhasilan dan kelengkapan sebuah keluarga. Dalam budaya Banjar, keberadaan anak tidak hanya dilihat sebagai anugerah dari Allah, tetapi juga sebagai simbol keberkahan, keberhasilan, dan kepastian sosial dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Penelitian oleh Jannah menunjukkan bahwa prosesi kelahiran seperti baayun, tasmiyah, dan akikah sarat dengan nilai religius yang mencerminkan kebahagiaan dan berkat yang

dibawa oleh kelahiran seorang anak.<sup>31</sup> Konsep ini sejalan dengan norma sosial yang telah terinternalisasi secara turun-temurun, di mana keberadaan anak dianggap sebagai bentuk penunaian tanggung jawab pasangan dan bagian dari tradisi yang harus dipenuhi.

Menurut teori stigma Erving Goffman, stigma muncul ketika ada ketidaksesuaian antara identitas individu dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, norma sosial masyarakat Banjar menyatakan bahwa “menikah harus disertai dengan memiliki anak”, sehingga pasangan yang menunda atau tidak ingin memiliki anak seringkali dianggap menyimpang dari norma tersebut. Walaupun bentuk stigma ini cenderung tidak agresif, melainkan terselubung dalam bentuk basa-basi dan pertanyaan-pertanyaan sosial seperti “kapan punya anak?” atau “jangan ditunda-tunda,” konsekuensinya tetap dapat menimbulkan tekanan psikologis dan merasa dihakimi.<sup>33</sup> Tekanan ini dapat menjadi beban emosional tersendiri bagi pasangan yang memilih untuk menunda kehamilan, sehingga menimbulkan ketegangan antara kepentingan personal dan tekanan sosial yang harus dihadapi.

Dari perspektif *maqāshid syarī‘ah*, konteks menunda kehamilan sejalan dengan prinsip menjaga maslahat dan menghindari madharat. Islam

---

<sup>31</sup> Raudatul Jannah, “Karakter Religius dalam Budaya Kelahiran Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,” *Muā ’sharah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 3 No. 2 (2022).

<sup>32</sup> Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, h. 3.

<sup>33</sup> Bruce G. Link dan Jo C. Phelan, “Conceptualizing Stigma,” *Annual Review of Sociology*, 2001.

menganjurkan Muslim untuk berketepatan dalam memiliki keturunan dengan mempertimbangkan kesiapan dan tanggung jawab.<sup>34</sup> Pendekatan ini menegaskan bahwa menunda kehamilan bukan berarti menolak keturunan, melainkan sebagai bentuk ikhtiar yang sejalan dengan prinsip menjaga jiwa dan akal (*hifzh al-nafs* dan *hifzh al-‘aql*). Penyikapan terhadap stigma ini harus mampu dilandasi pada pemahaman bahwa keputusan menunda kehamilan didasarkan pada pertimbangan yang sah dan maslahat, bukan semata-mata keinginan untuk menentang norma sosial.

Dalam perspektif tujuan perkawinan dalam Islam, memang terdapat tujuan untuk melahirkan keturunan (*hifzh al-nasl*), tetapi tujuan perkawinan tidak terbatas pada reproduksi semata. Perkawinan juga bertujuan mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menciptakan ketenangan dan tanggung jawab bersama.<sup>35</sup> Ketika masyarakat memaknai tujuan pernikahan hanya pada aspek memiliki anak, maka terjadi reduksi makna perkawinan menjadi semata-mata alat reproduksi. Inilah yang memperkuat stigma terhadap pasangan yang menunda kehamilan, karena mereka dianggap tidak memenuhi “fungsi utama” pernikahan menurut persepsi sosial.

Dalam perspektif sosiologi hukum, stigma yang muncul terhadap pasangan *childfree* di masyarakat Banjar dapat dipahami sebagai manifestasi dari bentuk kontrol sosial yang sangat kuat dan memiliki daya

---

<sup>34</sup> 'Audah dan Terj. 'Abdelmon'in, *Al-Maqashid untuk Pemula*, h. 8.

<sup>35</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 17–22.

pengaruh nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Norma yang berlaku secara turun-temurun dan tidak tertulis secara formal ini telah menjadi bagian dari kultur mereka, seolah-olah norma tersebut berfungsi sebagai “hukum sosial” yang mengatur perilaku masyarakat secara tidak resmi, tetapi dengan kekuatan yang seakan-akan mengikat<sup>36</sup>. Norma ini menetapkan bahwa pasangan yang baru menikah “seharusnya” segera memiliki anak, sebuah kepercayaan yang telah berakar kuat dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberlanjutan keluarga dalam masyarakat Banjar. Meskipun norma ini tidak tertuang dalam undang-undang atau regulasi formal, norma ini menjalankan fungsi yang hampir sama seperti sebuah hukum melalui tekanan sosial yang lembut namun efektif karena norma adalah apa yang kebanyakan orang lakukan, aapa yang *normal* dilakukan.<sup>37</sup>

Konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang paling berpengaruh dalam kehidupan sosial adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata hukum yang tertulis dalam peraturan formal.<sup>38</sup> Dalam konteks budaya Banjar, harapan agar pasangan segera memiliki anak merupakan bagian dari hukum yang hidup tersebut, norma

---

<sup>36</sup> Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Polity Press, 1984), h. 22-23,

<sup>37</sup> Myers dan Terj. Tusyani, *Sosial Psychology*, h. 213.

<sup>38</sup> Eugene Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law* (Harvard University Press, 1936), h. 61-64.

sosial yang secara tidak ditulis mengatur perilaku dan menumbuhkan rasa kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional. Meskipun tidak ada kewajiban formal yang mengikat secara hukum negara, norma sosial ini memiliki kekuatan “mengikat” yang mampu membatasi serta membentuk perilaku individu dan pasangan yang ingin menunda atau memilih untuk tidak memiliki anak.<sup>39</sup> Tekanan sosial ini bisa berwujud pertanyaan-pertanyaan, sindiran, pandangan penuh penilaian, bahkan sanksi sosial yang membuat pasangan merasa tertekan dan harus mengikuti norma yang berlaku. Namun individu kadang memiliki kebutuhan untuk menjadi unik, tampil beda dari orang lain, dan memiliki keinginan untuk mempertahankan kontrol terhadap hidupnya.<sup>40</sup>

Lebih mendalam, stigma ini juga dapat dilihat melalui mekanisme kontrol sosial yang dilandasi oleh teori hukum sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan dan kestabilan sosial. Norma-norma yang berkembang dalam masyarakat bertujuan menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenram dan berfungsi sebagai penjaga tatanan sosial dan penerus nilai-nilai tradisional yang sangat dihormati, seperti pentingnya memiliki keturunan untuk meneruskan garis keturunan, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan memperkuat identitas komunitas terutama di kalangan masyarakat Banjar yang sangat menjunjung tinggi nilai keluarga dan

---

<sup>39</sup> Murisal dan Sisrazeni, *Psikologi Sosial Integratif*, h. 103.

<sup>40</sup> Sarwono dan dkk, *Psikologi Sosial*, h. 134.

keturunan.<sup>41</sup> Dalam pandangan ini, pilihan untuk menunda atau tidak memiliki anak dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari norma yang telah mapan dan mengancam keberlangsungan nilai-nilai tersebut. Sebagai bentuk reaksi, masyarakat cenderung memberikan komentar, tekanan, atau bahkan penilaian negatif agar pasangan tersebut kembali ke jalur norma yang dianggap “benar” dan sesuai dengan budaya mereka.<sup>42</sup>

Dalam konteks masyarakat Banjar, dorongan sosial agar pasangan segera memiliki anak dalam masyarakat Banjar tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber keagamaan formal seperti Kitab Parukunan Banjar, Kitabun Nikah, maupun khotbah akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa norma tersebut bukan merupakan perintah textual agama, melainkan tumbuh sebagai konstruksi sosial yang berkembang melalui praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Norma ini terbentuk dari pengalaman kolektif lintas generasi, tradisi keluarga, serta pemaknaan agama yang bersifat sosial dan kultural. Anak diposisikan sebagai simbol keberhasilan perkawinan, penjaga kehormatan keluarga, serta penjamin keberlanjutan nasab, sehingga kehadirannya dianggap sebagai konsekuensi alami dari pernikahan. Dalam konteks ini, norma menyegerakan memiliki anak berfungsi sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan bekerja secara efektif dalam masyarakat meskipun tidak tertulis dan tidak bersumber langsung dari teks hukum formal. Norma tersebut ditegakkan

---

<sup>41</sup> Saebani, *Sosiologi Hukum*, h. 146.

<sup>42</sup> Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, h. 176.

melalui mekanisme kontrol sosial seperti nasihat, pertanyaan, dan penilaian moral, yang pada akhirnya melahirkan stigma terhadap pasangan yang memilih untuk menunda kehamilan.

Stigma terhadap pasangan *childfree* ini tak berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh struktur nilai, keyakinan religius, serta budaya lokal yang sangat kuat. Mereka memandang bahwa keberlanjutan keluarga dan garis keturunan merupakan aspek yang sangat penting dan harus dijaga demi keberlangsungan hidup dan identitas kolektif. Oleh karena itu, norma sosial semacam ini sebenarnya adalah cerminan dari bagaimana masyarakat memahami dan memaknai hukum keluarga versi mereka sendiri—suatu bentuk hukum yang hidup, yang berperan sebagai kontrol sosial yang efektif dan mampu menegakkan norma tanpa perlu peraturan formal<sup>43</sup>. Dengan kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa stigma terhadap pasangan *childfree* tidak semata-mata disebabkan oleh sikap budaya yang konservatif, tetapi juga mencerminkan kekuatan norma sosial sebagai instrumen kekuasaan dan kontrol budaya dalam menegaskan norma yang dianggap benar dan harus diikuti.<sup>44</sup>

Lebih jauh, jika dilihat dari teori psikologi perkembangan, masa dewasa awal secara normatif memang dikaitkan dengan tugas

---

<sup>43</sup> Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, h. 22.

<sup>44</sup> Saebani, *Sosiologi Hukum*, h. 159.

perkembangan seperti membangun keluarga dan menjadi orang tua.<sup>45</sup>

Namun, teori perkembangan modern menegaskan bahwa tugas ini tidak bersifat seragam secara waktu dan bentuk, melainkan bergantung pada kesiapan psikologis, ekonomi, dan sosial individu. Pasangan yang menunda kehamilan sejatinya sedang menata ulang *timeline* perkembangan mereka agar lebih sesuai dengan kesiapan mental dan kondisi hidupnya. Akan tetapi, masyarakat Banjar masih menggunakan standar perkembangan tradisional, yaitu “menikah lalu segera punya anak”, sehingga pasangan yang tidak mengikuti pola ini dianggap gagal atau tertinggal secara sosial.

Pada akhirnya, stigma terhadap pasangan yang menunda memiliki anak di masyarakat Banjar merupakan hasil pertemuan antara norma budaya, hukum sosial yang hidup, tekanan psikologis kolektif, serta pemaknaan sempit atas tujuan pernikahan. Stigma ini tidak hanya menilai pilihan pasangan, tetapi juga mengontrol identitas mereka sebagai suami-istri yang dianggap sah dan ideal dalam struktur sosial.

Stigma yang dialami oleh pasangan *childfree* ini adalah bukti nyata bagaimana norma sosial berfungsi layaknya hukum yang hidup dan memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku masyarakat, sekaligus memperlihatkan bahwa perbedaan pilihan hidup yang dianggap menyimpang seperti ini masih bisa memicu sanksi sosial yang cukup kuat. Meskipun mereka tidak melanggar hukum formal, pasangan tersebut tetap

---

<sup>45</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology A Life-Span Approach*, 5 ed. (Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 1981),

menghadapi tekanan sosial yang intens dan bisa memicu konflik internal dan eksternal. Jadi, stigma ini sekaligus memperlihatkan bahwa dalam masyarakat Banjar, norma sosial yang telah mengakar sangat kuat dan mampu menjadi kekuatan yang mengikat, membentuk perilaku, serta menjaga nilai dan tradisi keluarga yang dianggap fundamental bagi identitas dan keberlanjutan komunitas mereka.

Namun, dalam perspektif Hukum Islam, praktik semacam ini termasuk dalam kategori penilaian dan penghakiman terhadap orang lain (*hukm 'alā al-ghayr*) yang sangat dibatasi secara syar'i. Islam secara tegas melarang manusia untuk menetapkan status moral, iman, atau kesalahan orang lain tanpa dasar yang sah dan tanpa mengetahui kondisi batin serta realitas yang sebenarnya. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-Hujurāt [49]: 12

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِيُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا يَجْسَسُوا وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّهُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَهُمْ أَخِيهِ مِنْتَأْكِلْهُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ بِإِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.*

Stigma masyarakat terhadap pasangan yang menunda memiliki anak jelas bersumber dari prasangka sosial, bukan dari pengetahuan faktual tentang kondisi pasangan tersebut. Ketika masyarakat menyimpulkan bahwa pasangan yang belum memiliki anak adalah “tidak normal”, “kurang iman”, atau “menolak sunnah”, maka mereka telah jatuh pada bentuk

su'uzan (prasangka buruk) dan qadhf sosial (penjatuhan cap negatif tanpa bukti). Padahal, keputusan pasangan untuk menunda kehamilan adalah bagian dari ranah privat rumah tangga (*huqūq al-khushūshiyyah*) yang tidak boleh diintervensi kecuali jika terbukti menimbulkan mudarat nyata.<sup>46</sup> Dalam kaidah fiqh disebutkan: “*al-ashl fī al-ashyā’ al-ibāhah*” *Pada dasarnya segala urusan manusia adalah boleh sampai ada dalil yang melarang.* Tidak ada dalil yang mewajibkan pasangan untuk memiliki anak segera setelah menikah. Yang diwajibkan dalam Islam adalah bertanggung jawab jika anak itu ada, bukan memaksakan agar anak harus ada tanpa kesiapan.

Dengan demikian, stigma yang diberikan masyarakat Banjar kepada pasangan *childfree* atau yang menunda kehamilan dengan cap seperti “mandul”, “tidak berguna”, atau “pernikahan sia-sia” secara hukum Islam termasuk dalam bentuk kezaliman simbolik, karena merusak kehormatan (‘irdh) dan ketenangan jiwa orang lain. Ini bertentangan dengan prinsip *hifzh al-‘irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifzh al-nafs* (menjaga kesehatan jiwa) dalam *maqāshid al-syari‘ah*.<sup>47</sup>

Dengan kata lain, meskipun masyarakat merasa sedang “menasehati”, tetapi ketika nasihat berubah menjadi penghakiman, tekanan, dan stigma, maka ia telah keluar dari koridor amar ma'ruf dan masuk ke wilayah kezaliman sosial yang dilarang dalam Islam. Islam tidak

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah JIlid 3* (2009).

<sup>47</sup> Sabil, *Maqashid Syariah*.

mengajarkan pemakaan standar hidup keluarga, melainkan mendorong musyawarah, niat baik, dan tanggung jawab dalam setiap rumah tangga.<sup>48</sup>

## 2. Analisis pengaruh stigma terhadap kondisi psikologis pasangan *childfree*

Dari hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa stigma sosial terhadap pasangan yang memilih untuk menjalani kehidupan *childfree* memberikan dampak psikologis yang cukup serius dan beragam. Sebagian besar informan mampu menanggapi stigma tersebut dengan santai dan tidak terlalu terbebani, menunjukkan ketangguhan mental dan penetapan hati yang kuat. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang merasa tertekan, sedih, bahkan cemas setiap kali pertanyaan yang menyentuh inti keputusan mereka, seperti “Kapan punya anak?”, muncul dari lingkungan sekitar. Tekanan ini biasanya datang dari kerabat, tetangga, maupun masyarakat luas yang sering kali mempertanyakan keputusan mereka tanpa memahami latar belakang pribadi dan alasan mendalam di baliknya.<sup>49</sup>

Dalam perspektif teori stigma yang dikemukakan Goffman (1963), tekanan sosial ini dapat menimbulkan perasaan terasing dan merasa tidak diterima dalam komunitas, menurunkan harga diri, serta memicu stres berkepanjangan yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan mental dan hubungan pasangan. Bahkan, beberapa informan mengaku takut dianggap “tidak subur” atau “tidak normal”, padahal mereka menunda

---

<sup>48</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2007).

<sup>49</sup> Sarwono dan dkk, *Psikologi Sosial*, h. 134.

karena memang sedang dalam proses menyiapkan diri secara matang dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan uraian dalam *Childfree & Happy*, yang menunjukkan bahwa stigma negatif sering dialami oleh individu yang memilih hidup tanpa anak.<sup>50</sup> Ketakutan akan penilaian negatif dari masyarakat ini memperlihatkan bagaimana stigma eksternal dapat memperburuk kondisi emosional mereka, sekaligus menghambat proses mereka untuk terbuka dan saling mendukung satu sama lain.

Stigma masyarakat Banjar yang menuntut pasangan baru menikah untuk segera memiliki anak justru mengganggu proses perkembangan tersebut. Tekanan sosial berupa pertanyaan berulang seperti “kapan isi?” atau “jangan ditunda-tunda” dapat memunculkan rasa tidak nyaman, kecemasan, bahkan perasaan gagal memenuhi tugas perkembangan, meskipun keputusan menunda berasal dari pertimbangan rasional pasangan.

Dalam pendekatan psikologi sosial, stigma sosial dapat memunculkan proses persepsi, stereotip, dan diskriminasi yang mempengaruhi harga diri serta identitas sosial individu.<sup>51</sup> Stigma ini juga dapat menimbulkan tekanan sosial yang menyebabkan individu merasa dipandang negatif dan menginternalisasi pandangan tersebut, yang akhirnya mengganggu proses sosial identity dan otonomi mereka dalam menentukan pilihan hidup. Hal ini sejalan dengan teori identitas sosial Tajfel yang

---

<sup>50</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak* (Buku Mojok Group, 2021).

<sup>51</sup> Gerungan, *Psikologi Sosial*, h. 167.

menyatakan bahwa identitas diri seseorang terbentuk dari keanggotaan sosialnya beserta makna emosional yang dilekatkan padanya, sehingga penilaian negatif dari lingkungan sosial berpotensi memengaruhi konsep diri dan kesejahteraan psikologis individu.<sup>52</sup> Dampak psikologis ini berpotensi menimbulkan masalah seperti stres, kecemasan, dan rasa malu, yang secara signifikan menghalangi tugas perkembangan sesuai tahapan usia dan perjalanan hidup mereka. Dalam sudut psikologi sosial, tekanan konformitas cukup tinggi di masyarakat homogen seperti Banjar. Menurut Asch, individu cenderung menyesuaikan diri terhadap norma kelompok guna mendapatkan penerimaan sosial dan mengurangi konflik psikis. Menurut teori konformitas dan identitas sosial, individu yang tidak mengikuti norma mayoritas akan diposisikan sebagai kelompok menyimpang (*out-group*). Dalam konteks ini, pasangan yang menunda memiliki anak dianggap berbeda dari “pasangan normal”, sehingga muncul stereotip seperti “mandul”, “tidak lengkap”, atau “tidak wajar”. Stigma berfungsi sebagai alat tekanan agar pasangan kembali menyesuaikan diri dengan standar sosial yang berlaku.<sup>53</sup> Pasangan yang memilih untuk tidak mengikuti norma memiliki risiko dikucilkan secara sosial, meskipun mereka mampu melakukan adaptasi melalui penolakan terhadap tekanan tersebut. Beberapa informan menunjukkan bahwa mereka mampu bersikap

---

<sup>52</sup> Henri Tajfel, “Sosial Identity and Intergroup Behaviour,” *SAGE*, t.t., h. 69, <http://ssi.sagepub.com/content/13/2/65>.

<sup>53</sup> Gerungan, *Psikologi Sosial*, h. 80.

santai dan memaknai keputusan mereka sebagai bagian dari identitas pribadi, yang secara tidak langsung menegaskan bahwa interpretasi normatif tidak selalu mengikat mereka secara psikologis.<sup>54</sup>

Dari sudut pandang *maqāshid syarī‘ah*, menjaga kesehatan psikologis termasuk dari tekanan eksternal adalah bagian dari hifzh al-nafs dan hifzh al-‘aql. Jika stigma sosial ini menyebabkan kerusakan mental dan merusak hubungan keluarga, tindakan tersebut harus dikendalikan dan diatasi, karena bertentangan dengan prinsip *maqāshid* yang bertujuan menjaga kesejahteraan dan keamanan individu.<sup>55</sup> Maka dari itu, penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar untuk memahami dan menghormati pilihan pasangan, agar mereka tidak merasa tertekan dan terisolasi dari lingkungan sosial.

Lebih jauh, beberapa informan mengungkapkan bahwa semakin sering mereka mendapatkan pertanyaan dan tekanan, mereka menjadi semakin enggan untuk terbuka dan mengungkapkan alasan mereka secara jujur. Ini menunjukkan bahwa stigma tidak saja menyentuh aspek emosional, tetapi juga berdampak pada dinamika sosial dan komunikasi antarindividu. Keadaan ini memperlihatkan pentingnya membangun kesadaran sosial dan menyebarkan pemahaman bahwa setiap keluarga

---

<sup>54</sup> Sarwono dan dkk, *Psikologi Sosial*, h. 134.

<sup>55</sup> 'Audah dan Terj. 'Abdelmon'in, *Al-Maqashid untuk Pemula*, h. 9.

memiliki hak untuk menentukan jalannya sendiri tanpa harus dihakimi atau dirundung stigma yang berlebihan.<sup>56</sup>

Meskipun banyak pasangan *childfree* di masyarakat Banjar tampak merespons stigma dengan sikap santai, tersenyum, atau menghindari perdebatan ketika mendapat pertanyaan seperti “kapan punya anak”, sikap tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan terhadap stigma. Dalam perspektif sosiologi dan psikologi sosial, perilaku ini justru menunjukkan adanya resistensi simbolik atau resistensi pasif terhadap tekanan norma sosial. James C. Scott menjelaskan bahwa kelompok yang berada dalam posisi lemah sering melakukan *everyday resistance*, yaitu bentuk perlawanan yang tidak terbuka, seperti diam, menghindar, atau bersikap netral di ruang publik, tetapi tetap mempertahankan keyakinan dan pilihan hidupnya secara internal.<sup>57</sup> Hal ini sejalan dengan teori stigma Erving Goffman, yang menyebut bahwa individu yang mengalami stigma akan melakukan *stigma management*, yakni mengelola kesan di hadapan publik agar terhindar dari konflik dan penolakan sosial. Dalam konteks ini, pasangan *childfree* memilih untuk “tersenyum” atau tidak melawan secara langsung demi menjaga relasi sosial dan keharmonisan keluarga, namun di ruang privat mereka tetap merasakan tekanan, kekecewaan, dan

---

<sup>56</sup> Abute, *Konsep Kesadaran Sosial dalam Pendidikan*, h. 188.

<sup>57</sup> J. C Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (Yale University Press, 1985).

ketidakadilan atas penilaian masyarakat.<sup>58</sup> Secara psikologis, kondisi ini juga dapat dipahami melalui konsep *cognitive dissonance*, yakni ketegangan batin akibat perbedaan antara keyakinan pribadi dan tuntutan sosial yang diterima secara terus-menerus. Dengan demikian, sikap tenang yang ditampilkan pasangan *childfree* bukanlah tanda bahwa stigma tidak berpengaruh, melainkan bentuk strategi adaptif untuk bertahan dalam lingkungan sosial yang masih sangat menekan pilihan hidup mereka.<sup>59</sup>

Kesimpulannya, stigma masyarakat terhadap pasangan yang memilih kehidupan *childfree* memiliki dampak psikologis yang nyata, mulai dari rasa tertekan, kebingungan, hingga penurunan kepercayaan diri. Namun, di sisi lain, bagi pasangan yang mampu mengelola dan memperkuat diri secara emosional, pengalaman ini dapat menjadi proses pembelajaran untuk saling menguatkan dan memperkokoh hubungan mereka. Pengalaman tersebut bisa menjadi ujian sekaligus peluang bagi pasangan untuk meningkatkan kedekatan dan saling pengertian, asalkan diiringi dengan dukungan lingkungan dan pemahaman yang lebih luas.

### **3. Analisis faktor keputusan pasangan untuk *childfree* serta perspektif**

#### **Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut**

Berdasarkan hasil wawancara, penundaan kehamilan yang dilakukan oleh pasangan dalam penelitian ini secara implisit berkaitan dengan praktik pengaturan kelahiran melalui metode keluarga berencana

---

<sup>58</sup> Erving Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (Prentice-Hall, 1963),

<sup>59</sup> L Festinger, *A Theory of Cognitive Dissonance* (Stanford University Press, 1957).

(KB). Hal ini terlihat dari persepsi masyarakat yang sering mengaitkan penundaan kehamilan dengan penggunaan KB, terutama pada masa awal perkawinan. Dalam perspektif Hukum Islam, praktik KB tidak serta-merta bertentangan dengan syariat selama dilakukan secara temporer dan didasarkan pada pertimbangan maslahat. Ulama Banjar seperti Asywadie Syukur berpandangan bahwa KB dibolehkan apabila bertujuan menjaga kesehatan ibu, kesiapan mental dan ekonomi keluarga, serta tidak dimaksudkan untuk menolak keturunan secara permanen. Dengan demikian, KB dipahami sebagai wasilah (sarana) dalam pengaturan kelahiran, bukan sebagai tujuan untuk meniadakan keturunan.<sup>60</sup> Dalam kerangka *maqāshid al-syarī‘ah*, penundaan kehamilan melalui KB justru dapat mendukung perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), dan harta (*hifzh al-māl*), serta memastikan terwujudnya perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) secara lebih berkualitas.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* sangat beragam dan kompleks, didasari oleh berbagai alasan yang berkaitan dengan aspek psikologis, ekonomi, sosial, serta budaya. Secara umum, faktor utama yang diungkapkan meliputi kesiapan mental dan emosional (1), kondisi ekonomi yang belum stabil (2), pendidikan dan pengembangan karier (3), trauma masa lalu atau kekhawatiran menjadi orang tua yang

---

<sup>60</sup> Asywadie Syukur, *Keluarga Berencana dalam Perspektif Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (IAIN Antasari Press, 1998), h. 87-90.

buruk (4), serta kesepakatan bersama dalam rumah tangga (5). Banyak pasangan menegaskan bahwa memiliki anak bukanlah keputusan yang sederhana, melainkan terikat pada tanggung jawab besar yang membutuhkan kesiapan baik secara lahiriah maupun batiniah. Mereka cenderung menunda kehamilan hingga merasa cukup siap, baik dari segi mental maupun finansial, agar dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik bagi anak kelak.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, keputusan menunda kehamilan dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i dan diambil melalui musyawarah yang matang antara suami dan istri. Islam tidak melarang penundaan kehamilan secara mutlak, selama alasan yang digunakan bersifat maslahat, seperti pertimbangan kesehatan, kesiapan mental, dan kestabilan ekonomi. Prinsip musyawarah dan pertimbangan kemampuan ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang menegaskan pentingnya kesepakatan bersama dalam urusan keluarga, serta prinsip pencegahan mudarat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195.<sup>61</sup>

Pandangan Muhammadiyah dan NU tentang *childfree* menekankan posisi anak sebagai aset akhirat. Menutup pintu kehadiran anak secara permanen sama artinya memutus peluang amal jariyah. Dalam hal ini penting bagi masyarakat untuk mendalami terminologi fikih agar terhindar dari kekeliruan dalam memahami konsep keluarga berencana. Perbedaan

---

<sup>61</sup> Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*.

mendasar terletak pada *tanzhim al-nasl* dan *tahdid al-nasl*, di mana keduanya memiliki hukum dan tujuan yang jauh berbeda. *Tanzhim al-nasl* merupakan upaya mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu atau mematangkan kesiapan ekonomi, sebuah langkah rasional yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, *tahdid al-nasl* adalah pembatasan keturunan secara mutlak atau penolakan kehadiran anak sepenuhnya tanpa alasan medis yang mendesak. Melalui pemahaman yang tepat, kita dapat melihat bahwa Islam memperbolehkan perencanaan keluarga yang terukur, namun mayoritas ulama mengharamkan pemutusan keturunan secara permanen jika motifnya sekadar ingin mengejar kenyamanan hidup semata.<sup>62</sup>

Dalam kerangka *maqāshid al-syarī‘ah*, menunda kehamilan dapat dipandang sebagai bentuk upaya menjaga *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), dengan memastikan bahwa kelahiran anak dilakukan dalam kondisi yang terbaik dan mampu memberikan kehidupan yang layak. Selain itu, dari aspek *hifzh al-māl* dan *hifzh al-‘aql*, keputusan menunda kehamilan juga membantu pasangan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesehatan mental, sehingga mampu menciptakan keluarga yang seimbang dan harmonis.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Tri Anisah, *Hukum Childfree dalam Islam: Simak Pandangan Tegas Muhammadiyah dan NU*, 1 Februari 2026, <https://muhammadiyahsemarangkota.org/artikel/hukum-childfree-dalam-islam-pandangan-muhammadiyah-nu/>.

<sup>63</sup> 'Audah dan Terj. 'Abdelmon'in, *Al-Maqashid untuk Pemula*, h. 9.

Menurut teori *mashlahah mursalah*, segala tindakan yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, serta sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.<sup>64</sup> Dalam konteks ini, keputusan menunda kehamilan demi kemaslahatan keluarga dapat dipahami sebagai bagian dari kemaslahatan yang seimbang dan proporsional, karena bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga secara lebih matang dan bertanggung jawab. Dalam kerangka *mashlahah* yang diakui syariat, pertimbangan kesiapan mental, finansial, dan tanggung jawab orang tua merupakan upaya preventif untuk menghindari mafsat dan mewujudkan tujuan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) serta jiwa (*hifzh al-nafs*).<sup>65</sup>

Selain aspek legal *dan maqāshid syarī'ah*, penerapan prinsip musyawarah juga menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal ini sesuai dengan QS. Asy-Syura [42]: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَفَمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ه

*dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

Ayat ini menegaskan bahwa *mufāhadah* dan perundingan dalam rumah tangga adalah hal yang dianjurkan agar setiap keputusan diambil

---

<sup>64</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368–69.

<sup>65</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*.

secara bersama-sama dan bertanggung jawab.<sup>66</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keputusan menunda kehamilan yang didasarkan atas kesepakatan bersama bukanlah suatu bentuk pembangkangan agama, melainkan manifestasi dari prinsip tanggung jawab moral dan saling menghormati dalam berkeluarga. Lebih jauh lagi, teori *childfree* sendiri menunjukkan bahwa banyak pasangan memilih untuk menunda kehamilan secara temporer, bukan menolak anak sepenuhnya, karena mereka menyadari pentingnya kesiapan dan perlunya perencanaan yang matang demi kebaikan bersama.<sup>67</sup>

Dengan demikian, dalam kerangka hukum keluarga, menunda kehamilan tidak bertentangan dengan prinsip utama perkawinan, selama keputusan tersebut dibuat secara bersama-sama dan berdasarkan musyawarah serta prinsip maslahat keluarga. Bahkan dalam *maqāshid al-syarī‘ah*, menjaga keberlangsungan nasab (*hifzh al-nasl*) tidak hanya berkaitan dengan melahirkan keturunan, tetapi juga memastikan bahwa anak hadir dalam kondisi yang aman, layak, dan bermartabat. Oleh karena itu, penundaan kehamilan demi keadilan dan kesejahteraan keluarga dapat dikategorikan sebagai bentuk melindungi maslahat keluarga.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Mujiburrahman, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Antasari Press, 2015), h. 243.

<sup>67</sup> Amy Blackstone, *Childfree by Choice: The Movement Redefining Family and Creating a New Age of Independence* (Oxford University Press, 2019).

<sup>68</sup> 'Audah dan Terj. 'Abdelmon'in, *Al-Maqashid untuk Pemula*, h. 9.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mendorong pasangan memilih gaya hidup *childfree* atau menunda kehamilan adalah bagian dari usaha menjaga kualitas rumah tangga, stabilitas psikologis, serta memastikan fungsi-fungsi perkawinan berjalan secara proporsional. Keputusan tersebut tidak semata-mata pilihan pribadi, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam teori dan tujuan perkawinan yang menitikberatkan pada kesejahteraan dan kesiapan sebagai fondasi utama pembentukan keluarga.

Sayyid Sabiq dalam *fiqhus-sunnah* menyatakan bahwa pembatasan kelahiran diperbolehkan apabila suami memiliki tanggungan keluarga yang banyak sehingga dikhawatirkan tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak. Selain itu, faktor kondisi istri yang lemah, kehamilan yang terlalu sering, serta keterbatasan ekonomi keluarga juga menjadi alasan pemberlakuan. Bahkan, sebagian ulama menilai dalam situasi mendesak seperti itu, membatasi kelahiran bukan sekadar boleh, melainkan dianjurkan (disunnahkan). Pembatasan keturunan dibenarkan secara syariat demi kemaslahatan keluarga, terutama menyangkut kesehatan ibu, kemampuan pengasuhan anak, dan stabilitas ekonomi.<sup>69</sup>

Dari Jabir R.A, ia menceritakan: “*Kami pernah melakukan ‘azl pada masa Rasulullah dan hal itu terdengar oleh beliau, akan tetapi beliau tidak melarang kami.*” (HR. Muslim)<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Kamil Muhammad 'Uwaiddah dan Abdul Terj. Ghoffar, *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'*, 23 ed. (Daarul Kutub Al-'Ilmiyah, 2006), h. 425.

<sup>70</sup> Kamil Muhammad 'Uwaiddah dan Abdul Terj. Ghoffar, *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'*, 23 ed. (Daarul Kutub Al-'Ilmiyah, 2006), h. 425.

Berdasarkan paragraf dan hadits di atas, yang menjelaskan tentang membatasi keturunan diperbolehkan, maka menunda kehamilan pun pada dasarnya termasuk dalam upaya pengaturan kelahiran yang juga diperbolehkan, selama dilakukan dengan pertimbangan yang tepat dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan Hukum Keluarga Islam, keputusan menunda kehamilan dapat dianggap sebagai bentuk maslahat dan upaya menjaga keharmonisan keluarga, selama didasari oleh niat yang tulus, sesuai dengan syariat, serta dilakukan secara musyawarah. Pendekatan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'i, malah dapat dianggap sebagai bentuk pengamalan *maqashid syari'ah* dalam rangka menjaga maslahat keluarga secara menyeluruh, baik dari aspek keimanan, ekonomi, maupun sosial.

Meskipun penundaan kehamilan pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam, tidak semua bentuk penundaan dapat dibenarkan secara syar'i. Penundaan memiliki anak menjadi tidak diperbolehkan apabila dilakukan dengan niat menolak keturunan secara permanen, tanpa alasan maslahat yang sah, atau dilandasi oleh sikap meragukan rezeki dan ketentuan Allah. Beberapa informan masyarakat dalam penelitian ini juga memandang bahwa penundaan yang semata-mata bertujuan untuk kenyamanan pribadi, gaya hidup, atau kesenangan tanpa mempertimbangkan tanggung jawab jangka panjang terhadap tujuan perkawinan, merupakan bentuk penundaan yang tidak wajar. Selain itu, penundaan yang dilakukan secara sepihak tanpa

musyawarah antara suami dan istri juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam perspektif *maqāshid al-syari‘ah*, penundaan semacam ini berpotensi mengabaikan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) dan mereduksi tujuan perkawinan hanya pada kepentingan individual, sehingga tidak dapat dibenarkan secara normatif.